



BADAN PUSAT STATISTIK
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

2025



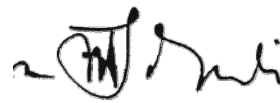
KATA PENGANTAR

Pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebagai salah satu penyelenggara negara. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi, serta mencapai sasaran kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja yang mencerminkan *outcome* atau prestasi kerja direktorat.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku kepentingan dalam memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial di masa yang akan datang, serta memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial ke depannya.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan dan pencapaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih. Semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami terima untuk penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Jakarta, 19 Januari 2026
Direktur Statistik Ketahanan Sosial



Nurma Midayanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja/Satuan Kerja	3
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	4
1.4 Potensi dan Permasalahan	8
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS).....	12
2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029	14
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.....	16
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	16
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025	21
3.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Terhadap Target Renstra .	42
3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	44
3.4. Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025	47
3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	49
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	54
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Tahun 2025-2029.....	15
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025	16
Tabel 3.1 Nilai NKO, Predikat PKO dan Interpretasi PKO.....	22
Tabel 3.2 Nilai dan Predikat PKO Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.....	23
Tabel 3.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2023-2025.....	25
Tabel 3.4 Kendala dan Solusi pada Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas Tahun 2025	27
Tabel 3.5 Kendala dan Solusi pada Capaian Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorale Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.....	39
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Terhadap Target Renstra	43
Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran 2025 Menurut Rincian <i>Output</i>	49
Tabel 3.8 Tabel Efisiensi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Menurut Sasaran dan Total	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sebaran SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Tingkat Pendidikan, 2025 ..	5
Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Jabatan Fungsional, 2025	6
Gambar 1.3 Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut Golongan, 2025 ...	7
Gambar 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2023-2025	22
Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terhadap Rata-rata Capaian Kinerja Eselon II pada Lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025	24
Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Indonesia, 2020-2025	45
Gambar 3.4 Penerimaan Piagam Penghargaan Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat	48
Gambar 3.5 Interface Web Infra Podes 2025	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.....	60
Lampiran 2 Struktur Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.....	62
Lampiran 3 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	63
Lampiran 4 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025	64
Lampiran 5 Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.....	65
Lampiran 6 Daftar Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas Tahun 2025.....	66
Lampiran 7 Surat Hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025.....	67
Lampiran 8 Daftar K/L/D/I Target Pembinaan Statistik Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025	70
Lampiran 9 Hasil TPSS Tahun 2025 (Bukti Dukung IKU Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.....	71
Lampiran 10 Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 202 Tahun 2025	72
Lampiran 11 Daftar Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025	73
Lampiran 12 Anggaran Belanja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi SAKTI per 30 Desember 2025	74
Lampiran 13 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025	75
Lampiran 14 Surat Hasil Penilaian SAKIP Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025	76

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Perban Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut

- **Visi Badan Pusat Statistik:** “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
- **Misi Badan Pusat Statistik**
 1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
 2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
 3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.
- **Tujuan Badan Pusat Statistik**
 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan;
 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien;
 3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.
- **Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik**
 1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
 2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu;
 3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

Visi, misi, tujuan di level satuan kerja sampai dengan LAKIN disusun **belum dapat ditetapkan**. Namun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada rancangan tersebut adalah:

- **Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial :** “Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.
- **Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**
 1. Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
 2. Menguatkan Peran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

- **Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan *Insight* yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.


Selanjutnya untuk tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menetapkan dua sasaran kegiatan dan dua indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025. Adapun target, realisasi, dan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 yang dicapai untuk kedua IKU yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas.	IKU 1. Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas.	100%	100%	100%
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	IKU 2. Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	64,39 poin	85,72 poin	120%
Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025				110%

Pada tahun 2025, capaian kinerja pada masing-masing IKU sudah melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,00. Capaian kinerja untuk IKU 1 dalam sasaran strategis pertama mencapai 100 persen sedangkan capaian kinerja untuk IKU 2 pada sasaran strategis kedua mencapai 120 persen. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Ketahanan Sosial sangat berhasil melampaui target indikator kinerja sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan baik dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2025 nilai SAKIP yang diperoleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 74,60 dengan predikat Sangat Baik. Dengan nilai tersebut dari Kertas Kerja Triwulan IV diperoleh nilai PKO Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 94,50 dengan predikat Baik. Ini menunjukkan bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi/target.

Kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 dalam penyelenggaraan statistik bersumber pada APBN dengan pagu pada Perjanjian Kinerja sebesar Rp7.012.174.000. Dengan adanya efisiensi anggaran menyebabkan pagu yang dapat digunakan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menjadi sebesar Rp1.669.416.000. Sampai akhir tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.412.265.949 (84,60 persen).



Dengan rata-rata capaian kinerja yang persentasenya melebihi persentase realisasi anggaran maka dapat dikatakan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah melakukan efisiensi anggaran.

Berbagai upaya untuk efisiensi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pelatihan Desa Cantik Kabupaten/Kota dilakukan secara *online* pada kegiatan Desa Cantik dan SPAK;
2. Koordinasi dengan K/L terkait jadwal penyusunan publikasi maupun pelaksanaan pembinaan statistik sektoral dilakukan secara daring/*online meeting*;
3. Sosialisasi ke daerah terkait kegiatan penyusunan publikasi maupun kegiatan lain secara *online*;
4. Pemberian penghargaan Desa Cantik dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan BPS lain;
5. Mengundang rapat dengan peserta KL tanpa memberikan anggaran *transport* lokal untuk peserta KL tersebut;
6. Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif agar kegiatan yang dicakup lebih optimal;
7. Rate paket *meeting* yang digunakan lebih rendah dari SBM agar kebutuhan jumlah peserta dapat terpenuhi.

The background is a complex digital-themed composition. It features a light blue grid with a white line graph showing fluctuating data points. Overlaid on this are various geometric and network-like elements: blue spheres of different sizes, thin white lines connecting nodes to form a network, and semi-transparent blue shapes that resemble architectural structures or data flow paths. The overall color palette is dominated by shades of blue, from light sky blue to deep navy blue.

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial merupakan laporan capaian dari kegiatan direktorat sebagai bentuk akuntabilitas dari penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi, karena setiap Instansi wajib membuat SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

SAKIP digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Instansi yang terdiri dari beberapa instrumen, antara lain perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sementara itu, sasaran SAKIP adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Di samping itu, ketersediaan LAKIN ini untuk menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi secara berkesinambungan. Sistem ini merupakan suatu instrumen yang mengukur transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap Instansi diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun.

Maksud penyusunan LAKIN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Statistik Ketahanan Sosial atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LAKIN adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2025.

Rumusan kesimpulan hasil evaluasi pada laporan ini, menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. Selain itu, penyusunan LAKIN juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Penyusunan LAKIN Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 merupakan rangkuman yang berisi target, sasaran, dan realisasi dari tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik Ketahanan Sosial selama tahun 2025. Tingkat capaian dalam pelaksanaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, digunakan sebagai ukuran kinerja dan umpan balik dalam memacu perbaikan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja/Satuan Kerja

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar;
3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kedudukan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputy Bidang Statistik Sosial. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dipimpin oleh seorang Direktur dengan jabatan eselon II.

b. Tugas

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagaimana tercantum pada Pasal 82 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;
4. dan pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Statistik Ketahanan Sosial. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2025 Direktur Statistik Ketahanan Sosial menetapkan sebanyak 13 Tim Kerja di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja utama, suplemen dan tambahan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

d. Susunan Organisasi

Berdasarkan pada Pasal 83 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, susunan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan susunan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdapat pada Lampiran 1.

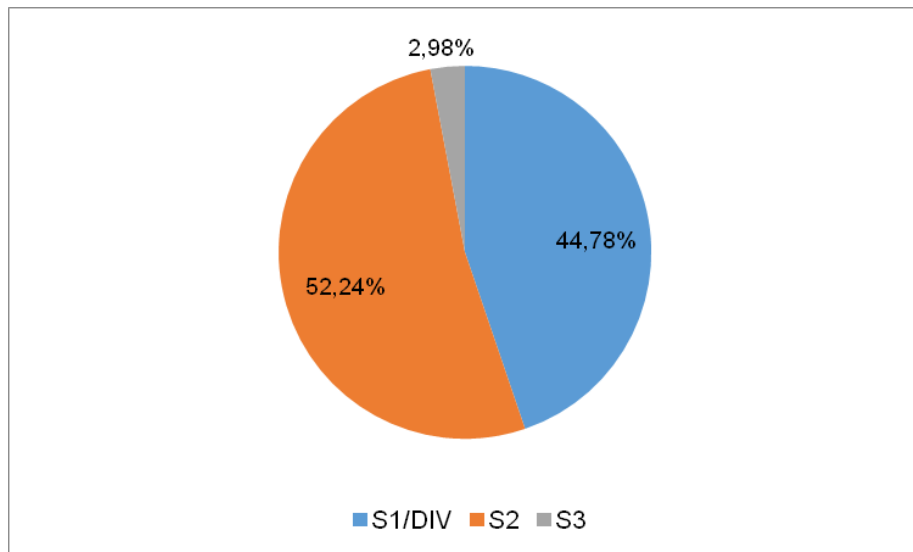
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 mengalami pergantian beberapa pegawai karena pensiun, mutasi dan pegawai baru. Sampai akhir tahun 2025 jumlah SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebanyak 67 orang, yang terdiri dari 19 laki-laki dan 48 perempuan. 67 pegawai tersebut merupakan pegawai aktif. Secara umum, SDM yang dibutuhkan pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah SDM yang secara teknis mampu menerapkan ilmu statistik dan menguasai teknologi. Memenuhi ragamnya kebutuhan pekerjaan fungsional, pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki kesempatan yang sama untuk terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

1) Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial didominasi oleh pegawai dengan pendidikan DIV/S1 dan S2. Sebaran pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



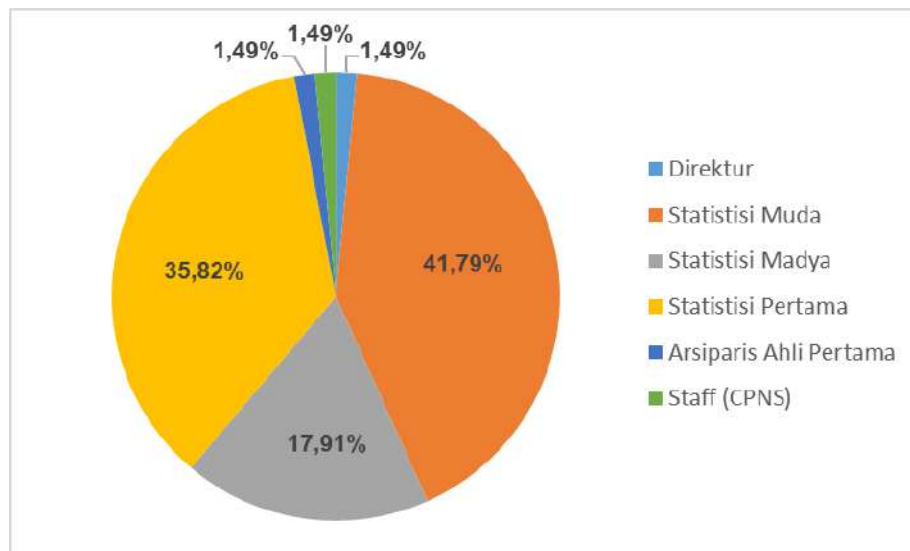
Gambar 1.1 Sebaran SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Tingkat Pendidikan, 2025

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang berpendidikan S1/DIV sebanyak 30 orang (44,78 persen), berpendidikan S2 sebanyak 35 orang (52,24 persen), dan yang berpendidikan S3 sebanyak 2 orang (2,98 persen).

Tingginya SDM yang dapat berhasil menempuh pendidikan S2 karena adanya kemudahan akses pengembangan diri yang diberikan dari BPS untuk para pegawainya yang ingin melanjutkan sekolah. Beberapa kemudahan akses yang diberikan BPS adalah dengan penyediaan beasiswa S2 dan S3 dalam negeri/*double degree* dan adanya kerja sama di bidang pengembangan pegawai dengan instansi lain/lembaga/universitas baik dari dalam maupun luar negeri.

2) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dipimpin oleh Direktur dan terdiri dari tiga kelompok jabatan, yaitu fungsional umum, terampil, dan ahli. Sebagai gambaran, sebaran dari jabatan fungsional di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sepanjang tahun 2025 sebagai berikut.



Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Jabatan Fungsional, 2025

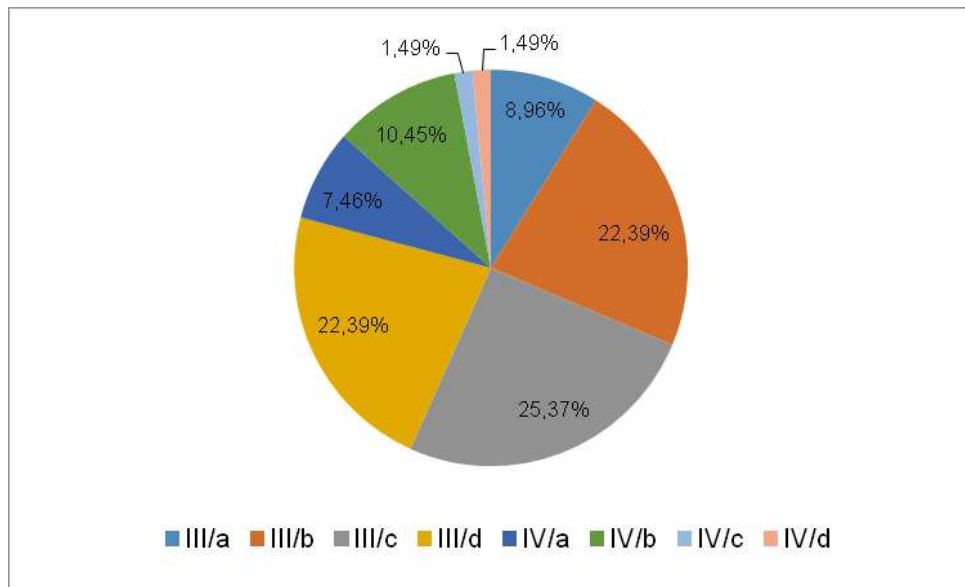
Pada akhir tahun 2025 SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut jabatan terdiri dari:

- 1 orang (1,49 persen) menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Direktur.
- 12 orang (17,91 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Madya.
- 28 orang (41,79 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda.
- 24 orang (35,82 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama.
- 1 orang (1,49 persen) menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Pertama.
- 1 orang (1,49 persen) merupakan Staf (CPNS).

Komposisi jabatan fungsional ini untuk memenuhi tantangan-tantangan pekerjaan yang terus berkembang akibat disrupsi teknologi informasi. Dinamika pekerjaan menyebabkan pegawai harus *agile* menghadapi perubahan yang terus berkembang.

3) Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Selanjutnya, untuk menunjang karier dalam bekerja sebagai ASN, pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki variasi golongan yang merata mulai dari III/a hingga IV/d. Sebaran golongan pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.3 Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut Golongan, 2025

Dinamika sepanjang tahun 2025, terjadi perubahan golongan pada beberapa pegawai dan dapat dipetakan pada akhir tahun 2025. Hasilnya, sebaran pegawai menurut golongan sebagai berikut:

- 6 orang (8,96 persen) yang memiliki Golongan III/a;
- 15 orang (22,39 persen) yang memiliki Golongan III/b;
- 17 orang (25,37 persen) yang memiliki Golongan III/c;
- 15 orang (22,39 persen) yang memiliki Golongan III/d;
- 5 orang (7,46 persen) yang memiliki Golongan IV/a;
- 7 orang (10,45 persen) yang memiliki Golongan IV/b;
- 1 orang (1,49 persen) yang memiliki Golongan IV/c;
- 1 orang (1,49 persen) yang memiliki Golongan IV/d.

Komposisi ini merupakan pijakan awal jenjang karier dengan peluang yang merata bagi seluruh pegawai di lingkup Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

b. Dukungan Anggaran

Kegiatan di lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial didukung oleh anggaran yang cukup untuk memenuhi seluruh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2025. Pada Tahun 2025, pada Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditandatangani tanggal 24 Januari 2025, dalam rangka Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial sebesar Rp. 7.012.174.000. Adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk kementerian/lembaga termasuk BPS tidak terkecuali Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berdampak terhadap besar anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV Tahun 2025 hanya sebesar Rp1.669.416.000.

1.4 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Ada beberapa potensi dalam melaksanakan pekerjaan di BPS, khususnya Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Beberapa potensi yang dapat dijadikan pijakan untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan besar dalam mendukung target-target pemerintah. Potensi dan dukungan yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial meliputi beberapa hal, di antaranya dukungan SDM, kolaborasi lembaga internasional, kepercayaan pemerintah, serta potensi inovasi yang diselenggarakan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Pada dukungan SDM, penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah didukung oleh SDM yang mumpuni. Pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang didukung oleh 67 sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi seluruh pegawai memiliki pendidikan tinggi. Potensi SDM dengan pendidikan tinggi tersebut turut memperlancar jalannya kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Pertama, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan kolaborasi dengan lembaga nasional maupun internasional guna menghasilkan indikator maupun metode baru. Kolaborasi yang dilaksanakan di antara dengan Forum Masyarakat Statistik dan World Bank dalam penghitungan kemiskinan ekstrem, *United Nations Crime Trend Survey* (UN CTS) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam menghasilkan data statistik kriminal, dan sebagainya.

Kedua, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berpotensi banyak indikator strategis yang mendukung RPJPN dan SDGs. Hal ini selaras dengan kepercayaan pemerintah yang menjadikan BPS sebagai sumber data rujukan dalam rangka RPJPN 2025-2045. Di antara indikator yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan sosial untuk mendukung RPJPN antara lain *gini ratio*, kemiskinan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan sebagainya. Selain itu, juga banyak menghasilkan indikator yang mendukung SDGs seperti data Jumlah desa tertinggal, Indeks Kebebasan, Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Selain itu, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga telah berinovasi menghasilkan Web infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes; dan Penggunaan Big Data untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Inovasi lainnya berupa pelaksanaan berbagai kegiatan antara lain Kompilasi berbagai tulisan pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang digabungkan dalam Hansos Gemar Menulis (Hansos Geulis), baik berupa bentuk karya ilmiah, opini di media, *storytelling*, dan jenis tulisan lainnya. Penerbitan Buletin *Hansos in A Week* sebagai informasi dan pengingat kegiatan Hansos selama satu minggu terakhir. Webinar Seri Hansos, Sharing Seri Master Baru dan Briefing Hansos. Senam dan Olahraga Bersama Hansos (Hansos Bergerak), Mungghahan Hansos, dan Lomba 17an Hansos.

b. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi tantangan tersendiri untuk diselesaikan. Beberapa hasil identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Data yang kurang akurat atau tidak relevan dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data;
2. Pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data statistik ketahanan sosial secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan data atau *insight*;
3. Ketidakpercayaan terhadap data yang dapat timbul akibat persepsi bias atau independensi yang diragukan;
4. Ketidakefahaman antar-instansi mengenai standar statistik dapat mengurangi integrasi SSN;
5. Ketimpangan kemampuan teknis SDM statistik antar Kementerian/Lembaga dapat menghasilkan kualitas data statistik sektoral bidang sosial yang tidak standar;
6. Kebijakan berupa penghematan anggaran dapat mempengaruhi kegiatan, di antaranya frekuensi dan pelaksanaan, yang mendukung pencapaian target kinerja;
7. Ketersediaan data dari unit lain (K/L maupun Direktorat) yang terlambat dari jadwal sehingga dapat menghambat penyusunan publikasi yang menggunakan data tersebut;
8. Hambatan pada pelaksanaan kegiatan lapangan di daerah (keterbatasan SDM maupun jadwal yang tumpang tindih) yang mempengaruhi hasil dan capaian di BPS Pusat.

Selanjutnya, penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial terdiri dari dua keluaran, yaitu publikasi dan laporan. Publikasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 terdapat 9 publikasi, yaitu Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes), Publikasi Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP), Publikasi Analisis Lingkungan Hidup Berkelanjutan (ALHB), Publikasi Analisis *Petty Corruption*, Publikasi Statistik Kriminal, Publikasi Statistik Politik, Publikasi Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia, Publikasi Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Berikutnya, laporan dan kegiatan rilis yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 laporan yaitu Laporan Desa Cantik dan 2 kegiatan rilis yaitu Rilis Kemiskinan Juli dan Rilis Ketimpangan Juli. Secara umum, permasalahan/kendala yang dihadapi dalam menyusun publikasi dan laporan tersebut di antaranya adalah waktu dan anggaran yang terbatas, serta standar publikasi yang baru dari diseminasi yang diterima dalam waktu yang terbatas. Pada kegiatan Desa Cantik, permasalahannya adalah terdapat beberapa pergantian desa yang akan dibina. Hal tersebut menyebabkan tindak lanjut kegiatan pembinaan sedikit terhambat. Selain itu, terdapat penyesuaian pembina Desa Cantik dan penyesuaian anggota tim Desa Cantik akibat penambahan rencana kerja dan beban kerja yang meningkat. Sementara itu, tidak tersedianya anggaran untuk *field evaluation* dan penyampaian penghargaan, membuat kegiatan Desa Cantik tidak terselenggara optimal.

Selain kegiatan laporan dan publikasi, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga memiliki *output* lain berupa kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral. Adapun kendala yang sering dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.

1.5 Sistematisasi Penyajian Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut juga dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematisasi penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran, Potensi dan Permasalahan yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, serta Sistematisasi Penyajian Laporan;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS); target kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029; Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025; Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan realisasi, capaian kinerja, dan nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025; capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 terhadap target Renstra; capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; prestasi dan inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025; serta realisasi dan efisiensi Anggaran;

Bab IV – Penutup, menjelaskan Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS)

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis adalah elemen penting dalam perencanaan strategis sebuah organisasi. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: visi memberikan arah utama berjalannya suatu organisasi, misi menjadi panduan, tujuan sebagai fokus yang harus dilakukan, dan sasaran strategis memecah tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih operasional dan dapat diukur. Berdasarkan Perban Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

a. Visi Badan Pusat Statistik

Visi menggambarkan perencanaan strategis K/L periode lima tahun. Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, sehingga, Visi BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2025-2029 adalah **“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan.

b. Misi Badan Pusat Statistik

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, BPS merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi BPS Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data.

c. Tujuan Badan Pusat Statistik

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien;
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, terpercaya dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

d. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Pencapaian sasaran ini diukur melalui IKSS berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Pencapaian sasaran ini diukur menggunakan IKSS berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Visi, misi, tujuan di level satuan kerja sampai dengan LAKIN disusun belum dapat ditetapkan. Namun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Statistik

Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi dan Tujuan dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah:

a. Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Visi menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi pada akhir periode perencanaan strategis, memberikan arah jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama. Visi dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah **“Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**. Visi tersebut dibangun untuk mendukung visi dari Kedepujian Bidang Statistik Sosial yaitu **“Penyedia Data Statistik Sosial yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**. Rumusan visi tersebut berarti bahwa Direktorat Statistik Ketahanan Sosial harus mampu memberikan kontribusi dalam menyediakan data statistik ketahanan sosial yang profesional serta menjadi mitra Kementerian/Lembaga dalam menyediakan data yang bermanfaat untuk perumusan kebijakan sesuai dengan visi presiden.

b. Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Untuk mencapai visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, maka ditetapkan misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
2. Menguatkan Peran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

c. Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka ditetapkan tujuan yang mendukung Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada dua tujuan yang ditetapkan yaitu:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan *Insight* yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Adapun target kinerja sendiri akan menjadi tolok ukur dalam pencapaian keberhasilan Strategi dan Sasaran

Strategis BPS yang diterjemahkan ke tataran yang lebih operasional dalam bentuk Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Berikut Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025-2029 yang secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Sosial yang Berkualitas							
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
	Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Ketahanan Sosial	Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik ketahanan Sosial yang menjadi Statistik Resmi	Persen	0	23,81	95,24	95,24	100
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Sosial yang Berkualitas							
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Poin (Skala 100)	64,39	66,80	68,40	72,40	76,40
	Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa untuk Menghasilkan Statistik Berkualitas	Persentase Kumulatif Desa yang Berpredikat Desa Cinta Statistik	Persen	0	3,49	4,10	4,71	5,32

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menetapkan target sebagai pedoman dalam melakukan seluruh kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai selama tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja. Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 (Lampiran 3). Target yang ditetapkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun dengan membandingkan capaian kinerja dengan target. Target pelaksanaan kegiatan yang ada di tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	100,00 Persen
2	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	64,39 Poin

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional :

Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas

melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berperan aktif dalam memberikan asistensi teknis, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip-prinsip statistik resmi. Pembinaan ini diciptakan agar setiap instansi memiliki pemahaman yang seragam tentang metodologi, standar metadata, serta tata kelola data, sehingga mampu menghasilkan data sektoral yang konsisten, berkualitas, dan dapat dikompilasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Prioritas Presiden:

1. Inpres 4 2025 : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS menyerahkan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPS dapat menyampaikan DTSEN kepada kementerian untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan kementerian yang sesuai dengan tugas dan kewenangan instansi pemohon melalui mekanisme data balikan. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki beberapa tugas dalam pelaksanaan DTSEN, antara lain:

- a. Bertanggung jawab melakukan identifikasi data hasil Sensus dan Survei di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan pemadanan/pemutakhiran DTSEN;
- b. Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya terkait Data Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan pemadanan/pemutakhiran DTSEN;
- c. Bertanggung jawab melakukan pembinaan dan atau memberikan masukan kepada direktorat lain yang melakukan pembinaan terhadap Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya tersebut yang telah teridentifikasi di poin b untuk meningkatkan kualitas Data Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan pemadanan/pemutakhiran DTSEN;
- d. Bertanggung jawab mengevaluasi hasil DTSEN termasuk evaluasi terhadap implementasi standar data pada poin c dalam pemutakhiran data di Kementerian/Lembaga dan instansi terkait.

2. Inpres 8 2025 : Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama, salah satunya penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala.

Dalam rangka menyediakan data dasar yang diperlukan dalam penghitungan tersebut, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan penghitungan kemiskinan ekstrem.

3. Makan Bergizi Gratis


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei *Monitoring* dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline.

Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam hal ini berperan dalam berbagai kegiatan, antara lain: sebagai Instruktur Nasional survei MBG, asistensi analisis laporan MBG, dan supervisi pelaksanaan lapangan. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), *Supplier* (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus *Monitoring* dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei *Monitoring* dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan *web monitoring* melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai



tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial akan melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tupoksi pada Perban tersebut.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2025, Pagu total anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum pada PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025 sebesar Rp7.012.174.000. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, tidak semua Pagu total anggaran tersebut dapat digunakan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga termasuk BPS tidak terkecuali Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Dampak efisiensi tersebut yaitu besar anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV Tahun 2025 hanya sebesar Rp1.669.416.000.

The background is a vibrant blue gradient with various abstract elements. At the top, there are several blue spheres of different sizes and curved lines. A white line graph with multiple peaks and valleys is visible in the upper left. In the center, there are faint, overlapping white charts and data points. At the bottom, there are more blue spheres and a network of white lines connecting various points, suggesting a digital or data-driven theme.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

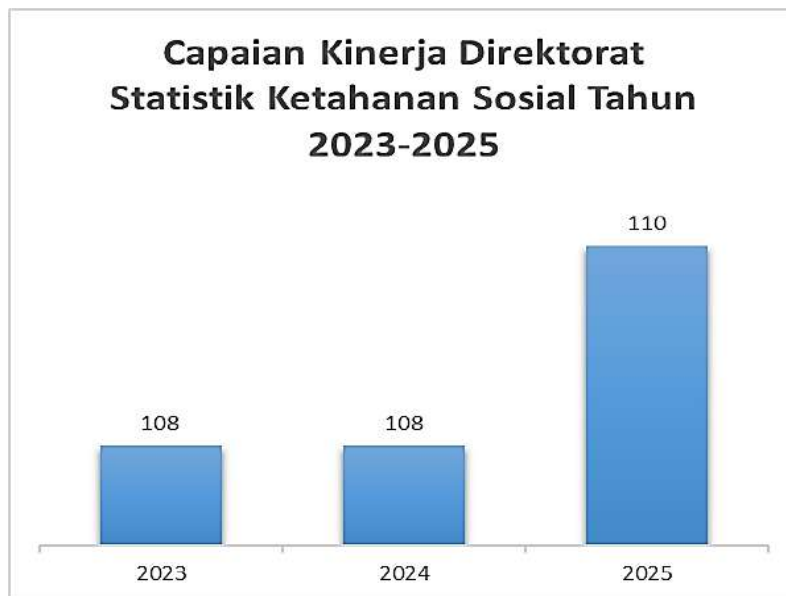
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja sekaligus sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai *monitoring* pencapaian kinerja serta membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/ program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang selanjutnya target sasaran dan IKU tersebut menjadi target pada PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025. Seluruh sasaran dan IKU telah diukur capaian kinerjanya setiap triwulanan. Pada akhir triwulan IV 2025 tidak hanya dihasilkan nilai realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 tetapi dihasilkan nilai penilaian kinerja organisasi. Penilaian ini memang merupakan hal baru dalam pengukuran capaian kinerja di BPS. Realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 secara rinci dijelaskan pada bagian a-e.

a. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Total selama 2023-2025.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan membandingkan nilai capaian kinerja yang diperoleh pada beberapa tahun tertentu, dalam hal ini periodenya adalah tahun 2023-2025. Secara umum capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2023-2024. Capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2023 dan 2024 itu bernilai sama yaitu 108 persen sedangkan capaian kinerja tahun 2025 mencapai 110 persen, terdapat peningkatan 2 persen dibandingkan tahun 2023-2024. Perbandingan capaian kinerja selama periode 2023-2025 dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2023-2025

b. Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024, Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nilai PKO diambil dari Kertas Kerja *Monitoring* Triwulan IV di mana nilai SAKIP yang diisi adalah nilai SAKIP tahun 2025 yang dirilis Inspektorat pada Bulan Desember 2025. Predikat PKO kemudian dikelompokkan menjadi 5 dengan rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), predikat dan interpretasinya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai NKO, Predikat PKO dan Interpretasi PKO

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Interpretasi PKO
(1)	(2)	(3)
$X > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik Baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Interpretasi PKO
(1)	(2)	(3)
60% < X ≤ 80%	BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih di bawah ekspektasi/target.
40% < X ≤ 60%	KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.
0% < X ≤ 20%	SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan di bawah ekspektasi/target.

Sumber: Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024

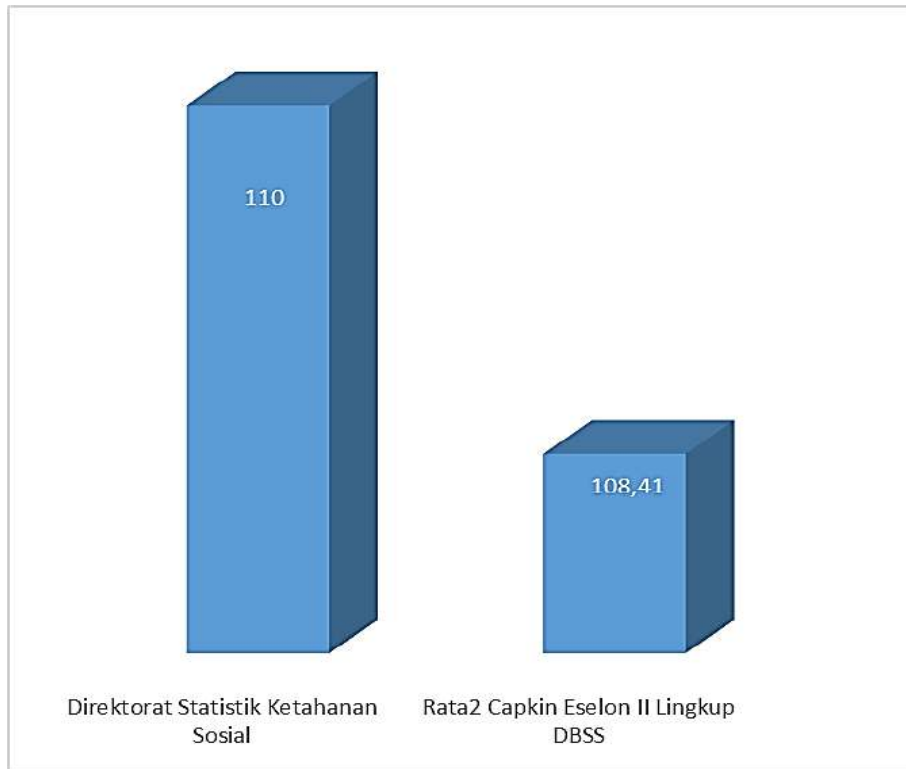
Pada tahun 2025 nilai SAKIP yang diperoleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 74,60 dengan predikat Sangat Baik. Dengan nilai tersebut dari Kertas Kerja Triwulan IV diperoleh nilai PKO Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 94,50 dengan predikat Baik (Tabel 3.2). Ini berarti bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi/target.

Tabel 3.2 Nilai dan Predikat PKO Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Unit Kerja :	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial					
Nilai SAKIP 2025:	74,6					
Predikat SAKIP 2025:	BB/Sangat Baik					
Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Satuan	Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)			
			Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK = (1)x(100%-(2))	
T1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan						
1.1.5	Terwujudnya penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas					
	1.1.5.1	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	100	Persen	100,00	10%
						90
T2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien						
2.1.3	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial					
	2.1.3.1	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	64,39	Poin	110	10%
						99
					Total Capaian PK	189
					NKO Rata-rata	94,5
					Predikat PKO	BAIK

Sumber: Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

c. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan Rata-rata Capaian Kinerja Eselon II pada Lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terhadap Rata-rata Capaian Kinerja Eselon II pada Lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025

Berdasarkan gambar 3.2, pada tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon II pada lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial. Berdasarkan hasil tersebut, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah mengidentifikasi beberapa upaya perbaikan kinerja selama tahun 2025 yang berpengaruh pada pencapaian kinerja tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi tim.
Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melakukan penyusunan tim dengan ketua dan anggota tim yang diusahakan tidak lintas tim. Hal ini untuk memudahkan koordinasi tim dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang diampu. Selain itu untuk meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
2. Penyusunan mitigasi risiko kegiatan.
Setiap tim yang menjadi pengampu indikator kinerja utama direktorat Statistik Ketahanan Sosial melakukan penyusunan mitigasi risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan.

3. Melakukan perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan tiap tim.
4. Melakukan upaya perbaikan pelaksanaan PSS agar dapat dilaksanakan lebih baik dengan menyusun rancangan jadwal pembinaan sejak awal tahun.

d. Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025

Untuk melihat peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial di antaranya dengan membandingkan target, realisasi, dan capaian kinerja selama beberapa tahun, yaitu tahun 2023-2025. Perbandingan tersebut secara detail dapat dilihat pada Tabel 3. 3.

Tabel 3.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran 1. Terwujudnya penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas										100
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		100	N/A (Belum dijadikan indikator)		100	N/A (Belum dijadikan indikator)		100
Sasaran 2. Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial										120
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Poin	N/A (Belum dijadikan indikator)		64,39	N/A (Belum dijadikan indikator)		85,72	N/A (Belum dijadikan indikator)		120

***) Sumber :** Target PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, terdapat dua sasaran dan kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang merupakan sasaran dan indikator baru dan ditetapkan pada tahun 2025. Pada tahun 2023-2024 keduanya belum dijadikan indikator sehingga hanya terisi untuk tahun 2025.

Sasaran kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang pertama yaitu Terwujudnya penyediaan Data dan *Insight* Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas dengan IKU Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas. Realisasi untuk IKU pertama

dapat mencapai target sebesar 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen.

Adapun sasaran kegiatan kedua yaitu Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU kedua yaitu Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Realisasinya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 64,39 poin sedangkan realisasinya sampai triwulan IV 2025 sebesar 85,72 poin sehingga capaian kinerja yang diperoleh untuk sasaran kedua sebesar 120 persen.

Mempertimbangkan kedua sasaran tersebut belum menjadi indikator pada tahun 2023-2024 maka target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023-2024.

e. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025 per IKU

1) Capaian Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas

Salah satu upaya untuk menyediakan data statistik ketahanan sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan dilaksanakan dengan menyediakan publikasi statistik ketahanan sosial yang Berkualitas. Ini kemudian dituangkan dalam salah satu indikator kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, yaitu “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas”. Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah Publikasi/Laporan Ketahanan Sosial yang Berkualitas dengan Seluruh Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang dihasilkan. Publikasi/Laporan yang berkualitas adalah publikasi/laporan yang bersumber dari kegiatan statistik yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek Pemanfaatan Data berkategori minimal Baik (Nilai: $\geq 2,6$).

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menargetkan 12 publikasi/laporan yang berkualitas. Ke-12 publikasi/laporan yang berkualitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes);
2. Laporan Desa Cantik;
3. Laporan Analisis Lingkungan Berkelanjutan (ALHB);
4. Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) ;
5. Publikasi Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP) ;
6. Publikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ;
7. Publikasi Statistik Kriminal;
8. Publikasi Statistik Politik;
9. Publikasi Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia;
10. Publikasi Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Rilis Kemiskinan Juli;
12. Rilis Ketimpangan Juli.

Semua publikasi/laporan sudah dihasilkan di triwulan IV tahun 2025 dan berdasarkan Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 dinyatakan bahwa kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah berkualitas. Berdasarkan hasil tersebut, maka seluruh publikasi yang dikoordinasikan unit kerja tersebut dinyatakan berkualitas. Adapun nilai yang diperoleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah 3.64 pada aspek Domain Kualitas Data dan 4,33 pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik. Dengan hasil penilaian tersebut, capaian persentase publikasi statistik ketahanan sosial yang berkualitas pada tahun 2025 telah mencapai 100 persen, sesuai dengan yang ditargetkan.

Meskipun semua publikasi/laporan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi dalam penyusunannya masih ditemui berbagai kendala pada triwulan I-IV. Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala dan Solusi secara rinci per triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kendala dan Solusi pada Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas Tahun 2025

Kendala	Solusi
(1)	(2)
Triwulan I	
1. Podes: Bukti SIQAF belum lengkap.	1. Podes: Melakukan koordinasi dengan Direktorat Diseminasi Statistik mengenai kelengkapan bukti SIQAF.
2. Desa Cantik: Tidak Tersedianya Anggaran Desa Cantik, Usulan Desa Cantik yang berubah-ubah, Pada saat pelatihan terdapat 1 peserta yang nilainya di bawah batas kelulusan.	2. Desa Cantik: Meminta tambahan anggaran pelatihan ke Biroren dengan Surat Deputy Bidang Sosial kepada Plt. Sestama, perubahan usulan akan diakomodir pada Kepka Revisi, dan melakukan Remedial bagi peserta yang belum lulus.
3. SLHI: Proses peninjauan konten revidu masih berjalan, ada beberapa indikator yang belum sesuai (belum <i>match</i>) dengan FDES 2013, beberapa indikator lingkungan bergantung pada data sektoral dari K/L, sehingga risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian data sulit dikendalikan, dan belum semua K/L memiliki konsep dan definisi dari data yang mereka kumpulkan.	3. SLHI: Merencanakan <i>zoom meeting</i> dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2025.
4. SDLP: Terdapat kategori yang berbeda untuk data kondisi mangrove dan padang lamun di Provinsi Bali.	4. DLP: Studi referensi/diskusi untuk mengonversi.
5. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai perubahan iklim memiliki data yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.	5. SLHB: Melakukan <i>proxy</i> atau pendekatan menyesuaikan dengan ketersediaan data.
6. Statistik Kriminal: Pembangunan <i>web entry</i> mengalami kemunduran jadwal sehingga uji coba terlambat dilakukan.	6. Statistik Kriminal: Melakukan koordinasi dengan SIS untuk mempercepat pembangunan <i>web entry</i> .

Kendala	Solusi
(1)	(2)
7. Statistik Politik: Perubahan alamat <i>web entry</i> sehingga perlu migrasi data <i>user</i> provinsi.	7. Statistik Politik: Membuat daftar <i>user</i> provinsi untuk dimasukkan dalam <i>web entry</i> .
8. SPAK: Tidak tersedianya anggaran pelatihan petugas dan pelaksanaan lapangan SPAK 2025 karena efisiensi anggaran, dan bukti SIQAF kurang lengkap (menunggu kelengkapan bukti dukung dari direktorat Diseminasi).	8. SPAK: Perencanaan kegiatan refreshing petugas SPAK 2025 secara <i>online</i> dan melakukan koordinasi dengan direktorat Diseminasi terkait kelengkapan bukti SIQAF.
9. Rilis Kemiskinan Juli: Belum adanya kepastian apakah akan ada percepatan rilis kemiskinan seperti tahun sebelumnya.	9. Rilis Kemiskinan Juli: Melakukan diskusi dengan pimpinan untuk mendapatkan arahan terkait dengan kepastian kapan rilis Maret 2025.
10. Rilis ketimpangan Juli: Belum adanya kepastian apakah akan ada percepatan rilis	10. Rilis ketimpangan Juli: Melakukan diskusi dengan pimpinan untuk mendapatkan arahan terkait dengan kepastian kapan rilis Maret 2025.
Triwulan II	
1. Podes : Beberapa daerah sulit (Papua, Papua Barat dan Kaltim) membutuhkan perpanjangan waktu pendataan lapangan.	1. Podes: Daerah tersebut mengajukan surat perpanjangan waktu, dan perlu ada penyesuaian SOP.
2. Desa Cantik: Jumlah Desa Cantik 2021-2024 pada lampiran mengalami perubahan karena ketidakterediaan bukti dukung	2. Desa Cantik: Melakukan konfirmasi ke daerah terkait <i>output</i> Desa Cantik 2021-2024
3. SLHI: Beberapa indikator lingkungan bergantung pada data sektoral dari K/L, sehingga risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian data sulit dikendalikan, belum semua K/L memiliki konsep dan definisi dari data yang mereka kumpulkan, dan ketidakhadiran beberapa K/L dalam <i>zoom meeting</i> sehingga <i>monitoring</i> tidak optimal	3. SLHI: Merencanakan <i>zoom meeting</i> kembali dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2025
4. SDLP: Web entri SISLH 2025 saat dilakukan aktivitas entri masih menyisakan permasalahan Aplikasi	4. SDLP: Penyempurnaan aplikasi
5. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai rujukan penyusunan publikasi dan metadata perubahan iklim, disesuaikan dengan data yang tersedia di Indonesia, dan tidak semua data yang diminta sudah tersedia di K/L terkait. Ada data yang kondisinya belum <i>update</i>	5. ALHB: Melakukan <i>proxy</i> atau pendekatan menyesuaikan dengan ketersediaan data, dan melakukan <i>proxy</i> atau pendekatan menyesuaikan dengan ketersediaan data
6. SPAK: Anggaran SPAK 2025 ditiadakan, dan literatur terbatas dari media <i>online</i>	6. SPAK: Karena kegiatan pengumpulan data SPAK ditiadakan maka tidak dilakukan RTL TW 2 2025 berikut : finalisasi pedoman dan kuesioner SPAK 2025, uji coba aplikasi FASIH SPAK 2025, dan pencarian literatur secara <i>offline</i> dengan mengunjungi perpustakaan KPK dan Perpustakaan Nasional
7. Rilis Kemiskinan Juli: Diperlukan pengecekan dan evaluasi terhadap data Susenas yang diterima, dan penentuan penimbang yang digunakan	7. Rilis Kemiskinan Juli: Koordinasi dengan direktorat Kesra, PMSS, dan Duknaker terkait evaluasi data Susenas yang diterima, dan diskusi dan meminta arahan pimpinan
8. Rilis Ketimpangan Juli: Diperlukan pengecekan dan evaluasi terhadap data Susenas yang	8. Rilis Ketimpangan Juli: Koordinasi dengan direktorat Kesra, PMSS, dan Duknaker terkait

Kendala	Solusi
(1)	(2)
diterima, dan penentuan penimbang yang digunakan.	evaluasi data Susenas yang diterima, diskusi dan meminta arahan pimpinan.
Triwulan III	
<p>1. Podes: Capaian Akhir Pengumpulan data di BPS Provinsi Papua hanya 97,27 persen, sebanyak 152 desa non respons karena faktor keamanan, transportasi dan anggaran. Dengan ini capaian pengumpulan data Podes 2025 adalah 99,82 persen desa/kelurahan di Indonesia, dan model formula IKG masih perlu beberapa <i>exercise</i> sebelum diputuskan pimpinan</p>	<p>1. Podes: BPS Kabupaten sudah berupaya melakukan Penyesuaian SOP: a. Pengoptimalan anggaran tambahan dari Pusat; b. Penggunaan data sekunder dari dinas terkait; c. Pengumpulan data melalui telepon; dan d. Janji titik temu di luar desa), dan tahapan yang sudah dilakukan untuk formulasi IKG pada TW 3 (a. Penyusunan dan penetapan revisi variabel, indikator, dan aturan <i>scoring</i> yang digunakan dalam penghitungan IKG, b. Pelaksanaan <i>exercise</i> dengan menerapkan beberapa metode pembobotan, antara lain <i>Equal Weighting</i>, <i>Principal Component Analysis</i> (PCA), <i>Principal Factor Analysis</i> (PFA), dan <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA), c. Perbandingan hasil IKG baru dari masing-masing metode <i>exercise</i> dengan IKG tahun 2024 menggunakan berbagai ukuran statistik, seperti selisih nilai, korelasi, dan koefisien variasi, d. Evaluasi hasil penghitungan IKG dengan membandingkan peringkat (ranking) hasil metode baru terhadap peringkat kesulitan versi BPS daerah, e. Pelaksanaan rapat penyampaian hasil akhir dan pembahasan formula IKG baru bersama pimpinan.)</p>
<p>2. Desa Cantik: Tidak tersedia anggaran untuk acara penganugerahan (<i>awards</i>) Desa Cantik terbaik dan mengundang peserta daerah penerima penghargaan.</p>	<p>2. Desa Cantik: Memasukkan kegiatan <i>awards</i> Desa Cantik pada kegiatan Sosialisasi SE2026 dan HSN 2025, di mana anggaran semua disediakan anggaran SE.</p>
<p>3. SLHI: Beberapa data sektoral dari K/L mengalami <i>update</i>, sehingga mengalami perbaikan dan perlu dientri kembali pada Publikasi SLHI 2025, beberapa data tidak konsisten dengan tahun sebelumnya, misalnya satuan yang berubah atau perbedaan angka yang melonjak/menurun tajam, sehingga perlu konfirmasi ulang dengan K/L penyedia data.</p>	<p>3. SLHI: Menindaklanjuti hasil pemeriksaan silang data yang sudah dientri dalam Publikasi SLHI 2025, melakukan konfirmasi ulang dengan K/L penyedia data, dan meng-<i>update</i> kembali data yang tidak konsisten berdasarkan hasil konfirmasi dari K/L penyedia data.</p>
<p>4. SDLP: Mekanisme pemilihan lokasi kualitas air laut yang akan ditampilkan di publikasi, sudah rutin dilakukan tetapi belum dituliskan mekanismenya. Berpotensi pelaksana yang belum pernah menangani, menjadi kesulitan dalam menelusuri, sebagian besar SDLP telah disetujui pemenuhannya oleh KKP namun pemberian data menunggu pengesahan PKS antara BPS dan KKP, sebagian data dari kementerian belum diperoleh karena menanti pengesahan PKS sehingga</p>	<p>4. SDLP: Melakukan kajian pemilihan sampel kualitas air laut data dari dinas terkait di tingkat provinsi, untuk digunakan dalam pemilihan sampel data yang akan ditampilkan pada publikasi SDLP 2025, mengoptimalkan pemanfaatan Portal Data KKP untuk memperoleh sebagian data SDLP yang dibutuhkan, dan mengoptimalkan data terkait kelautan dan perikanan dari BPS dan sumber lain yang tersedia pemutakhirannya</p>

Kendala	Solusi
(1)	(2)
finalisasi pengolahan menunggu situasi dan kondisi final.	
5. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai rujukan penyusunan publikasi dan metadata perubahan iklim, disesuaikan dengan data yang tersedia di Indonesia, tidak semua data yang diminta sudah tersedia di K/L terkait. Ada data yang kondisinya belum <i>update</i> , data masih banyak yang belum masuk, koordinasi dengan K/L terkendala kesibukan K/L, dan pembabakan Analisis ada perubahan sehingga butuh waktu untuk penyesuaian.	5. ALHB: Melakukan <i>proxy</i> atau pendekatan menyesuaikan dengan ketersediaan data, dan melakukan analisis sesuai pembabakan baru.
6. Statistik Kriminal: Data dari K/L belum seluruhnya terkumpul, dan beberapa data belum seluruhnya terkumpul sehingga belum bisa dilakukan eksplorasi dan pengolahan.	6. Statistik Kriminal: Berkoordinasi dengan K/L terkait pengumpulan data, dan melakukan pengolahan untuk data yang sudah tersedia.
7. Statistik Politik: Data dari K/L pusat belum seluruhnya terkumpul.	7. Statistik Politik: Dilakukan <i>monitoring</i> pengumpulan data K/L
8. SPAK: Usulan Kegiatan SPTK diadakan kembali pada Tahun 2027, sehingga memerlukan waktu dan proses kembali dalam pengajuannya, dan literatur dan bahan dukung teknis bahan penulisan publikasi terbatas dari media <i>online</i> .	8. SPAK: berkoordinasi dengan tim yang terkait, dan menyesuaikan dengan ketersediaan data
9. Kemiskinan Kabupaten/Kota: Adanya instruksi untuk percepatan penghitungan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kabupaten/kota 2025	9. Kemiskinan Kabupaten/Kota: Percepatan jadwal rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/ kota 2025 dengan BPS Daerah.
Triwulan IV	
1. Podes: Sosialisasi hasil Podes 2025 sebagai salah satu media untuk mendiseminasikan hasil Podes tidak dapat dilaksanakan.	1. Podes: Diseminasi hasil Podes 2025 tetap dilakukan melalui cara lain yaitu <i>upload</i> publikasi di <i>website</i> BPS
2. Desa Cantik: (1) <i>Website</i> Desa Cantik yang belum bisa dirilis untuk Publik, (2) Proses Penyusunan Kepka dan Perka memakan waktu rewiu Kepka di JDIH yang cukup lama, (3) Kendala dalam menentukan Target Desa Cantik binaan 2026 karena beberapa daerah tidak sanggup membina 3 desa/kelurahan mengingat padatnya kegiatan tahun 2026.	2. Desa Cantik: (1) Memberikan <i>feedback</i> Web Desa Cantik yang sudah dibuat dan menunggu kesiapan infrastruktur di Direktorat SIS, (2) Mengkomunikasikan melalui WA dengan PIC Hukum untuk <i>follow up</i> proses rewiu Kepka dan Perka, (3) Melakukan konfirmasi usulan Target Desa Cantik binaan tahun 2026.
3. SLHI: (1) Beberapa data sektoral dari K/L mengalami <i>update</i> , sehingga mengalami perbaikan dan perlu dientri kembali pada Publikasi SLHI 2025 (2) Beberapa data tidak konsisten dengan tahun sebelumnya, misalnya satuan yang berubah atau perbedaan angka yang melonjak/menurun tajam, sehingga perlu konfirmasi ulang dengan K/L penyedia data.	3. SLHI: (1) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan silang data yang sudah dientri dalam Publikasi SLHI 2025, (2) Melakukan konfirmasi ulang dengan K/L penyedia data, (3) Meng- <i>update</i> kembali data yang tidak konsisten berdasarkan hasil konfirmasi dari K/L penyedia data.
4. SDLP: (1) Jumlah desa tepi laut 2025 lebih rendah dibandingkan jumlah desa tepi laut 2024, secara	4. SDLP: (1) Mengikuti solusi dalam publikasi Podes yaitu memberikan penjelasan catatan di setiap

Kendala	Solusi
(1)	(2)
logika tidak relevan, namun jelaskan dengan tidak dilakukannya pendataan pada 152 desa karena kendala keamanan dan lainnya dan ditemukan data sekunder yang tidak konsisten, (2) Beragam pekerjaan minor dan mayor pada tahap pengolahan dan analisis, dengan waktu yang tumpang tindih ditambah dengan pekerjaan tambahan, baik teknis dan nonteknis, berpengaruh terhadap progres pekerjaan. Hal ini karena adanya perbedaan kapasitas masing-masing SDM, berpotensi membebani SDM dengan kapasitas yang mumpuni, (3) Pembatasan waktu reformat ke dalam Indesign karena berbagi akun <i>official</i> BPS untuk adobe Indesign, adanya revisi hasil pengolahan beberapa tabel yang cukup memberikan tambahan <i>effort</i> dalam aktivitas reformat ke dalam Indesign.	tabel terkait. Data sekunder yang tidak konsisten diputuskan tidak dipakai karena dapat menimbulkan <i>misleading</i> bagi pengguna data, (2) SDM dengan kapasitas yang lebih kuat membantu SDM dengan kapasitas standar, (3) Melakukan pembagian waktu yang ketat dalam penggunaan akun, melakukan pendampingan melekat terhadap SDM yang membutuhkan dengan mengeluarkan <i>effort</i> yang relatif besar sehingga Pelaksanaan Penyusunan Publikasi Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2025 dapat diselesaikan dengan tuntas, baik, dan memberikan daya tarik khusus di tingkat Lembaga (BPS).
5. ALHB: Ada reviu dan perbaikan dari pimpinan dan diseminasi terbatas waktu dengan jadwal rilis.	5. ALHB: Menyegerakan melakukan perbaikan sehingga publikasi bisa dirilis tepat waktu.
6. Statkrim: Data statistik peradilan pidana yang bersumber dari K/L belum seluruhnya tersedia hingga batas akhir penyusunan publikasi.	6. Statkrim: Pembahasan mengenai statistik peradilan pidana tidak ditampilkan dalam publikasi Statistik Kriminal, dan dialihkan untuk disajikan dalam Laporan Kegiatan Data Tunggal Statistik Kriminal (DTSK) Tahun 2025.
7. Statpol: (1) Ketersediaan data, khususnya data Pilkada tahun 2005 sampai dengan 2013, (2) Data hasil Pilkada merupakan isu sensitif belakangan ini, khususnya data yang mencakup identitas pasangan calon kepala daerah, (3) Minimnya dokumentasi proses Pilkada sebelum tahun 2024 (4) Terbatasnya akun Indesign yang resmi sehingga <i>layouting</i> hanya dapat dikerjakan oleh 1 orang.	7. Statpol: (1) Menyajikan data Pilkada yang tersedia di KPU dan ditambah dengan data dari berbagai media, (2) Konsultasi dengan Bawaslu dan DKPP terkait data terkait identitas pasangan calon kepala daerah yang dapat disajikan pada publikasi, (3) Mengajukan permintaan dokumentasi Pilkada tahun 2015-2020 ke Bawaslu RI, (4) Menggunakan aplikasi Indesign Portable yang tidak resmi.
8. SPAK: Reviu publikasi Analisis <i>Petty Corruption</i> dari pimpinan melewati batas tanggal <i>upload</i> publikasi pada Simotik.	8. SPAK: Karena non ARC, publikasi masih aman dapat di- <i>upload</i> pada bulan Desember.
9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: (1) Kompleksitas indikator karakteristik kemiskinan (pendidikan, pekerjaan, kondisi perumahan, akses layanan dasar) menuntut kehati-hatian dalam pemilihan variabel agar selaras dengan konsep dan definisi statistik resmi, (2) Diperlukannya pencermatan berlapis untuk memastikan konsistensi angka, konsep, definisi, dan narasi analisis antara bab, tabel, dan infografik, sehingga proses finalisasi membutuhkan waktu yang relatif panjang.	9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: (1) Menyusun prioritas indikator karakteristik kemiskinan yang paling relevan dan sering digunakan dalam analisis kebijakan, dengan tetap mengacu pada konsep dan definisi BPS, (2) Mengoptimalkan koordinasi melalui pembagian peran yang jelas antara penulis dan penelaah, serta penerapan <i>rolling review</i> untuk mempercepat konsolidasi masukan.
10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota: (1) Semakin menurunnya tingkat kemiskinan di sejumlah kabupaten/kota berdampak pada	10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota: (1) Menerapkan pengendalian kualitas estimasi dengan menjadikan indikator karakteristik

Kendala	Solusi
(1)	(2)
semakin kecilnya jumlah sampel rumah tangga miskin dalam data Susenas Maret 2025. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya <i>Relative Standard Error</i> (RSE) pada beberapa indikator karakteristik kemiskinan di tingkat kabupaten/kota, sehingga membatasi ketajaman analisis dan ruang interpretasi hasil, khususnya untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif rendah, (2) Diperlukannya pencermatan berlapis untuk memastikan konsistensi angka, konsep, definisi, dan narasi analisis antara bab, tabel, dan infografik, sehingga proses finalisasi membutuhkan waktu yang relatif panjang.	kemiskinan yang memiliki nilai <i>Relative Standard Error</i> (RSE) tidak memenuhi kriteria sebagai NA (<i>Not Available</i>), (2) Mengoptimalkan koordinasi melalui pembagian peran yang jelas antara penulis dan penelaah, serta penerapan <i>rolling review</i> untuk mempercepat konsolidasi masukan.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk rekomendasi perbaikan kinerja berupa rencana tindak lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Podes:

a. Triwulan I

Pengiriman surat kegiatan Podes 2026 ke Daerah (jadwal kegiatan, alokasi petugas dll), rapat Interkementerian tentang Kebutuhan Data pada Podes 2026, penyusunan Kuesioner Podes 2026, penyusunan buku pedoman Podes 2026, penyusunan bahan ajar Podes 2026, dan penyusunan QG Podes 2026.

b. Triwulan II

Workshop Intama, Pelatihan Innas, Pelatihan Inda, Pelatihan Petugas, dan Pengumpulan Data.

c. Triwulan III

Evaluasi Data, dan Pengolahan Podes serta IKG.

d. Triwulan IV

Finalisasi data Podes, dan Penyusunan publikasi Podes.

2. Descan:

a. Triwulan I

Persiapan Kegiatan Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).

b. Triwulan II

Monitoring Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).

c. Triwulan III

Uji Coba CAWI dan *Dashboard* Penilaian Desa Cantik 2026, Sosialisasi Penilaian Desa Cantik 2026, Penilaian Mandiri Desa Cantik, Verifikasi Penilaian Desa Cantik di Provinsi, *Desk Evaluation*, *Field Evaluation*, Pleno Penilaian Akhir Desa Cantik; dan

Penganugerahan Desa Cantik Terbaik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).

d. Triwulan IV

Pemeriksaan *Output* Desa Cantik 2026 dan Keberlanjutan 2021-2025 untuk Web Desa Cantik, Pembuatan Kepka Desa Cantik Revisi 2026, dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).

3. SLHI:

a. Triwulan I

Melakukan evaluasi penyusunan Publikasi SLHI 2026.

b. Triwulan II

Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2026, Menyiapkan surat permintaan data ke K/L, Menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (*dummy table*, dsb), Melakukan *zoom meeting* dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2026, dan Terseselaikannya perpanjangan PKS antara BPS dengan BMKG.

c. Triwulan III

Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Melakukan entri data pada Publikasi SLHI 2026, dan Melakukan pemeriksaan data pada Publikasi SLHI 2026.

d. Triwulan IV

Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2027, dan Melakukan rilis Publikasi SLHI 2026.

4. SDLP:

a. Triwulan I

Melaksanakan evaluasi tahap persiapan SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026, melaksanakan evaluasi tahap pengumpulan data SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026, melaksanakan evaluasi tahap pengolahan dan analisis data SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026, dan melaksanakan reviu kinerja tahap diseminasi dan evaluasi SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026.

b. Triwulan II

Perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan pesisir serta Persiapan tema, *outline*, dan narasi publikasi, penguatan aplikasi SISLH 2026 kolaborasi dengan Tim Direktorat Sistem Informasi Statistik, pengumpulan data sekunder di tingkat daerah, menyusun draf narasi/analisis tematik, dan penyusunan *template* publikasi.

c. Triwulan III

Lanjutan perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan pesisir serta penyusunan publikasi, pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, pencarian informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), melanjutkan draf narasi/analisis tematik/menyusun infografis, memfinalkan *template* publikasi, dan melaksanakan penyusunan publikasi.

d. Triwulan IV

Lanjutan pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, lanjutan periode pencarian informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggaran, lanjutan periode pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya, lanjutan pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), memfinalkan draf narasi/analisis tematik/infografis, melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam diseminasi kegiatan penyusunan publikasi Statistik Sumber Daya Laut Pesisir, evaluasi internal, dan finalisasi publikasi.

5. ALHB:

a. Triwulan I

Rapat Pembahasan Persiapan kegiatan ALHB tahun 2026.

b. Triwulan II

Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, menyiapkan surat permintaan data ke K/L, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (*dummy table*, dsb), dan melakukan *zoom meeting* dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi ALHB 2026.

c. Triwulan III

Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, melakukan entri data pada Publikasi ALHB 2026, dan melakukan pemeriksaan data pada Publikasi ALHB 2026.

d. Triwulan IV

Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, dan melakukan rilis Publikasi ALHB 2026.

6. Statkrim:

a. Triwulan I

Rapat pembahasan persiapan kegiatan Statistik Kriminal 2026, pengiriman surat kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan *web entry* Simonpolkam 2026.

b. Triwulan II

Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, menyiapkan surat permintaan data ke K/L dan daerah, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (*dummy table*, *outline* publikasi, dsb), dan melakukan rewiu dan perancangan *web entry* dalam rangka pengumpulan data kriminal 2026.

c. Triwulan III

Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, melakukan pengolahan data Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan data Publikasi Statistik Kriminal 2026.

d. Triwulan IV

Menyusun draf Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Statistik Kriminal 2026.

7. Statpol:

a. Triwulan I

Rapat pembahasan persiapan kegiatan Statistik Politik 2026, pengiriman surat kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan *web entry* Simonpolkam 2026.

b. Triwulan II

Koordinasi dengan sumber data untuk penyusunan Statistik Politik 2026 dilakukan lebih awal sebelum 30 Juni 2026.

c. Triwulan III

Pengumpulan data dan dokumentasi dari sumber data sudah dilakukan sebagai dukungan pada penulisan publikasi Statistik Politik 2026.

d. Triwulan IV

Mengajukan penggunaan akun Indesign lebih dari satu orang untuk mempercepat penyusunan publikasi Statistik Politik 2026.

8. SPAK:

a. Triwulan I

Persiapan kegiatan SPAK 2026.

b. Triwulan II

Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan SPAK yang dapat dilaksanakan di antaranya penyusunan *Quality Gates* SPAK 2026, dan Pengumpulan data.

c. Triwulan III

Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan SPAK yang dilaksanakan adalah pengolahan dan pemeriksaan data SPAK.

d. Triwulan IV

Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan yang dilaksanakan adalah pengumpulan data SPAK 2026 dan penyusunan publikasi IPAK 2026.

9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia:

a. Triwulan I

Menyusun perbandingan (*trend analysis*) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis.

b. Triwulan II

Penyusunan *outline* dan *dummy table* untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional.

c. Triwulan III

Menerima data Susenas KOR dari Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penyusunan publikasi kemiskinan makro, melakukan reviu sintaks pengolahan untuk data KOR (karakteristik kemiskinan), melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pengolahan karakteristik kemiskinan, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan karakteristik kemiskinan dan menyusun draf halaman muka (*cover*) Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro.

d. Triwulan IV

Melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025, dan mengunggah naskah Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025 melalui Simotik.

10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota:

a. Triwulan I

Menyusun perbandingan (*trend analysis*) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis.

b. Triwulan II

Penyusunan *outline* dan *dummy table* untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional.

c. Triwulan III

Reviu kembali sintaks pengolahan (d disesuaikan dengan kuesioner terupdate), pemeriksaan kondisi data (konsistensi, penimbang, dsb), pengolahan angka kemiskinan kabupaten/kota 2026, rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/kota 2026 dengan BPS Daerah, pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2025, pemeriksaan silang (*crosscheck*) hasil pengolahan karakteristik kemiskinan

kabupaten/kota 2026, dan penyusunan draf publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026.

d. Triwulan IV

Menyusun analisis karakteristik kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data Susenas Maret 2026, melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026, dan mengunggah naskah Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025 melalui Simotik.

10. Rilis Kemiskinan Juli:

a. Triwulan I

Penyusunan *Timeline* BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk BPS daerah, dan melakukan revidi sintaks pengolahan.

b. Triwulan II

Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draf Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

c. Triwulan III

Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

d. Triwulan IV

Kegiatan telah selesai di triwulan III.

11. Rilis Ketimpangan Juli:

a. Triwulan I

Penyusunan *Timeline* BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk BPS daerah, dan melakukan revidi sintaks pengolahan.

b. Triwulan II

Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draf Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

c. Triwulan III

Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

d. Triwulan IV

Kegiatan telah selesai di triwulan III.

2) Capaian Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial

Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial juga mengupayakan penguatan statistik sektoral K/L/D/I sebagai perwujudan peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik ketahanan sosial. Pada tahun 2025, Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki target sebanyak 6 K/L/D/I untuk dibina. Adapun ke-6 K/L/D/I yang menjadi target tersebut adalah:

1. Kejaksaan Agung RI;
2. Kepolisian Negara RI;
3. Kementerian Sosial;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Kementerian Desa dan PDT;
6. Kementerian Transmigrasi.

Indikator kinerja sasaran Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah merupakan indikator komposit dari 2 variabel pembentuk, yaitu: 1. Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektor sesuai Standar (80 persen) dan 2. Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Dirktorat dalam penyelenggaraan statistik Sektor. (20 persen).

Berdasarkan penilaian dari sekretariat PSS, pada tahun 2025 Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial mendapatkan nilai TPSS yang cukup bagus yaitu sebesar 106,67 poin. Sedangkan persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Dirktorat dalam penyelenggaraan statistik Sektor, Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial menargetkan 1.94 persen.

Berdasarkan nilai di atas, maka Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 sudah mencapai 85,72 poin, sedangkan target hanya 64,39 poin. Sehingga capaian kinerja sasaran strategis Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 adalah sebesar 120 persen.

Dalam mencapai sasaran ini, Dirktorat Statistik Ketahanan Sosial menghadapi beberapa kendala pada triwulan I-IV. Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala dan Solusi secara rinci per triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kendala dan Solusi pada Capaian Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Kendala	Solusi
(1)	(2)
Triwulan I	
1. Kejaksanaan Agung RI: a. Jadwal antara BPS dan K/L yang bentrok sehingga terkadang realisasi pelaksanaan mundur dari jadwal yang direncanakan. b. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.	1. Kejaksanaan Agung RI: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kejaksanaan RI untuk menjadwalkan pembinaan. B. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran dari K/L.
2. Kepolisian Negara RI: a. Kurangnya dukungan dari pimpinan sehingga pelaksanaan pembinaan (identifikasi kegiatan statistik dan penentuan kegiatan statistik prioritas pembinaan) menjadi terhambat. b. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.	2. Kepolisian Negara RI: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian RI untuk menjadwalkan pembinaan. d. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran dari K/L.
3. Kemensos: a. Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan secara langsung ke K/L lokus binaan. b. pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.	3. Kemensos: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Sosial untuk menjadwalkan pembinaan. B. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial.
4. KPK: a. Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan secara langsung ke K/L lokus binaan. b. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.	4. KPK: a. peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPK untuk menjadwalkan pembinaan. b. pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran dari KPK.
5. Kemendes dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di Anggaran BPS maupun KL. b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun sejauh ini masih masuk <i>timeline</i> .	5. Kemendes dan PDT: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Desa PDT untuk menjadwalkan pembinaan. B. Pelaksanaan pembinaan secara daring.
6. KemenTranmigrasi: a. Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di Anggaran BPS maupun KL. b. Merupakan kementerian baru yang belum banyak tahu terkait kegiatan EPSS tahun sebelumnya. c. Karena kementerian baru, belum mempunyai akun khusus untuk mengakses indah (metadata, SDS) dan Romantik. D. Pelaksanaan kegiatan pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun sejauh ini masih masuk <i>timeline</i> .	6. KemenTranmigrasi: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Transmigrasi PDT untuk menjadwalkan pembinaan. b. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran dari K/L.
Triwulan II	
1. Kejaksanaan Agung: a. Jadwal antara BPS dan K/L yang bentrok sehingga terkadang realisasi pelaksanaan mundur dari jadwal yang	1. Kejaksanaan Agung: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kejaksanaan RI untuk menjadwalkan pembinaan,

Kendala	Solusi
(1)	(2)
direncanakan b. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan Juni.	b. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran dari Kejaksaan, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi Kejaksaan ketika anggaran sudah tersedia.
2. Kepolisian Negara RI: a. Kurangnya dukungan dari pimpinan sehingga pelaksanaan pembinaan (identifikasi kegiatan statistik dan penentuan kegiatan statistik prioritas pembinaan) menjadi terhambat. b. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral bulan April-Mei. Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan Juni	2. Kepolisian Negara RI: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian RI untuk menjadwalkan pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran dari Kepolisian, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi Kepolisian ketika anggaran sudah tersedia.
3. Kemensos: a. Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan secara langsung ke K/L lokus binaan anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan Juni b. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.	3. Kemensos: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Sosial untuk menjadwalkan pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi Kementerian Sosial ketika anggaran sudah tersedia
4. KPK: a. Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan secara langsung ke K/L lokus binaan, anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan Juni, b. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.	4. KPK: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPK untuk menjadwalkan pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara daring atau menggunakan anggaran KPK saat anggaran belum tersedia, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi KPK ketika anggaran sudah tersedia.
5. Kemendesa dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan Juni b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun sejauh ini masih masuk <i>timeline</i>	5. Kemendesa dan PDT: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Desa PDT untuk menjadwalkan pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara daring saat anggaran belum tersedia, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi Kementerian Desa PDT ketika anggaran sudah tersedia
6. Kementransmigrasi: a. Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral bulan April-Mei. B. Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan Juni c. Merupakan kementerian baru yang belum banyak tahu terkait kegiatan EPSS tahun sebelumnya d. Karena kementerian baru, belum mempunyai akun, khusus untuk mengakses indah (metadata, SDS), e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun sejauh ini masih masuk <i>timeline</i> .	6. Kementransmigrasi: a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk menjadwalkan pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara daring saat anggaran belum tersedia, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi K/L ketika anggaran sudah tersedia.

Kendala	Solusi
(1)	(2)
Triwulan III	
1. Kejaksanaan Agung: Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan	1. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan K/L untuk menjadwalkan pembinaan
2. Kepolisian Negara RI: a. Kurangnya dukungan dari pimpinan sehingga pelaksanaan pembinaan menjadi terhambat, b. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan	
3. KPK: pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan	2. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan secara daring
4. Kemendesa dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan Juni, b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun sejauh ini masih masuk <i>timeline</i>	
5. KemenTransmigrasi: pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan	
Triwulan IV	
1. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.	1. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian RI untuk menjadwalkan pembinaan.
2. Pelaksanaan pembinaan terkait EPSS yang mengundang semua K/L sekaligus tidak dapat dilaksanakan secara luring karena tidak tersedia anggaran <i>fullday</i> .	2. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan secara daring.

Adapun rekomendasi perbaikan kinerja berupa Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.

a. Triwulan I tahun 2026:

Perencanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026.

b. Triwulan II tahun 2026:

1. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral;
2. Melakukan money mandiri semester 1;

3. Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK.
- c. Triwulan III tahun 2026:
 1. Mengikuti Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL);
 2. Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK.
- d. Triwulan IV tahun 2026:
 1. Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK;
 2. Melakukan monev mandiri semester 2.

3.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Terhadap Target Renstra

Direktorat Hansos memiliki empat sasaran kegiatan dengan empat IKU pada Renstra 2025-2029 yaitu:

- a. **Sasaran Kegiatan 1:** Terwujudnya Penyediaan Data dan *Insight* Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas, dengan IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas”;
- b. **Sasaran Kegiatan 2:** Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU “Persentase Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Ketahanan Sosial yang Menjadi Statistik Resmi”;
- c. **Sasaran Kegiatan 3:** Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial”;
- d. **Sasaran Kegiatan 4:** Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa untuk Menghasilkan Statistik Berkualitas dengan IKU “Persentase Kumulatif Desa yang Berpredikat Desa Cinta Statistik”.

Dari empat sasaran tersebut, hanya dua sasaran kegiatan yang menjadi target yang akan dicapai pada tahun 2025, yaitu sasaran kegiatan 1 dan sasaran kegiatan 3, di mana target kedua sasaran tersebut menjadi target PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025. Ketercapaian kedua sasaran tersebut terhadap target renstra disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Terhadap Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Capaian Terhadap Target 2029 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas					100	100
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial					120	112,2
Tingkat keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Poin	64,39	76,40	85,72	120	112,2

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas capaian kinerja sudah tercapai 100 persen, bahkan untuk indikator Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Ketahanan Sosial targetnya sudah melebihi dari target tahun 2029. Pada tahun 2029 target hanya 76,40 poin tetapi realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai 85,72 poin. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 sudah tercapai seperti yang dituangkan dalam PK Direktorat Statistik Sosial 2025 dan sejalan juga dengan target renstra tahun 2025.

Beberapa faktor pendorong pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam mencapai target yaitu Pertama, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan kolaborasi dengan lembaga nasional maupun internasional guna menghasilkan indikator maupun metode baru. Kolaborasi yang dilaksanakan di antara dengan Forum Masyarakat Statistik dan World Bank dalam penghitungan kemiskinan ekstrem, *United Nations Crime Trend Survey* (UN CTS) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam menghasilkan data statistik kriminal, dan sebagainya.

Kedua, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berpotensi banyak indikator strategis yang mendukung RPJPN dan SDGs. Hal ini selaras dengan kepercayaan pemerintah yang menjadikan BPS sebagai sumber data rujukan dalam rangka RPJPN 2025-2045. Di antara indikator yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan sosial untuk mendukung RPJPN

antara lain *gini ratio*, kemiskinan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan sebagainya. Selain itu, juga banyak menghasilkan indikator yang mendukung SDGs seperti data Jumlah desa tertinggal, Indeks Kebebasan, Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Yang ketiga yaitu tersedianya sumber daya yang mumpuni di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan kualifikasi pendidikan tinggi dan keahlian serta keterampilan khusus yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan, baik yang bersifat rutin seperti pelaksanaan kegiatan survei maupun penyusunan publikasi, kegiatan ad-hoc maupun keterlibatan pegawai sebagai perwakilan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk menjadi narasumber maupun partisipan dalam beberapa forum internasional (UNESCAP, UNSC, SESRIC, dan *UN expert group meeting, working group*, dan lain sebagainya);

Yang keempat yaitu melakukan perencanaan sebelum melakukan kegiatan. Pada awal tahun dilakukan identifikasi kegiatan tahun 2025. Setelah identifikasi kegiatan kemudian dibentuk tim, yang anggota tim tidak ada tumpang tindih, sehingga ketua tim dapat mengatur anggotanya secara penuh. Semua tim segera menyusun jadwal rancangan kegiatan yang akan dilakukan selama setahun.

Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target yaitu:

1. Data yang kurang akurat atau tidak relevan dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data;
2. Pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data statistik ketahanan sosial secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan data atau *insight*;
3. Ketidakpercayaan terhadap data yang dapat timbul akibat persepsi bias atau independensi yang diragukan;
4. Ketidaktepahaman antar-instansi mengenai standar statistik dapat mengurangi integrasi SSN;
5. Ketimpangan kemampuan teknis SDM statistik antar Kementerian/Lembaga dapat menghasilkan kualitas data statistik sektoral bidang sosial yang tidak standar;
6. Kebijakan berupa penghematan anggaran dapat mempengaruhi kegiatan, di antaranya frekuensi dan pelaksanaan, yang mendukung pencapaian target kinerja;
7. Ketersediaan data dari unit lain (K/L maupun Direktorat) yang terlambat dari jadwal sehingga dapat menghambat penyusunan publikasi yang menggunakan data tersebut;
8. Hambatan pada pelaksanaan kegiatan lapangan di daerah (keterbatasan SDM maupun jadwal yang tumpang tindih) yang mempengaruhi hasil dan capaian di BPS Pusat.

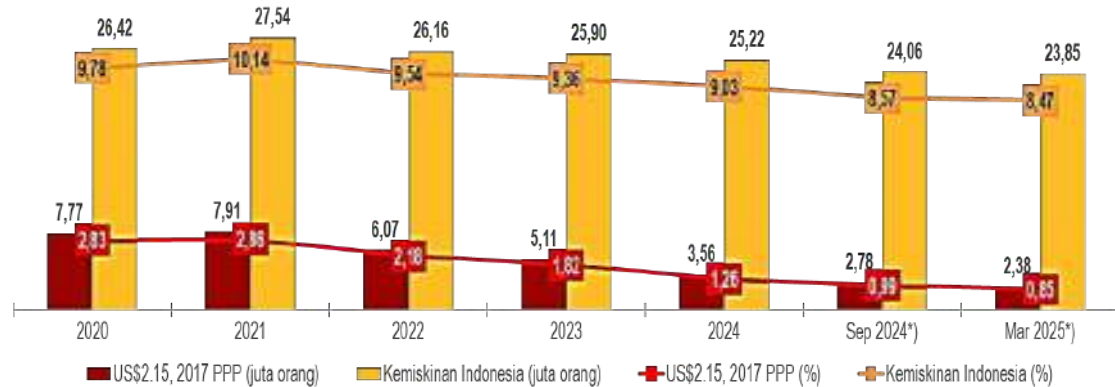
3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

A. Output yang sudah dihasilkan per prioritas

1. Output salah satu Prioritas Presiden: Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama salah satunya

penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. Berdasarkan hasil penghitungan terakhir, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan seperti digambarkan dalam Tabel berikut.



Keterangan:

- Sumber perkembangan miskin ekstrem (US\$2.15, 2017 PPP) 2020-2024 adalah pip.worldbank.org/country-profiles/IDN
- *) Merupakan estimasi BPS menggunakan metode Bank Dunia

Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Indonesia, 2020-2025

2. Output Pembinaan Statistik Sektor (Prioritas Nasional)

- Konsultasi dan Asistensi Analisis Data Kriminal;
- Pembinaan Satu Data Indonesia;
- Pembinaan Proses Bisnis;
- Pembinaan Kelembagaan;
- Pembinaan Sistem Statistik Nasional;
- Pembinaan Kualitas Data;
- Pembinaan Standar Data Statistik dan Metadata Statistik Kementerian Sosial;
- Pembinaan Romantik di Kemendes dan PDT;
- Rapat Evaluasi Pembinaan Statistik Sektor dan Persiapan Evaluasi Pembinaan Statistik Sektor (EPSS) 2026;
- Menyusun Laporan Pembinaan Statistik Sektor Tahun 2025.

4. Makan Bergizi Gratis

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam hal ini berperan dalam berbagai kegiatan, antara lain: sebagai Instruktur Nasional survei MBG, asistensi analisis laporan MBG, dan supervisi pelaksanaan lapangan.

5. Output Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Prioritas Nasional)

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, ikut terlibat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Keterlibatan tersebut antara lain, sebagai PIC untuk beberapa KLD seperti Kemensos, Kemendes dan PDT, BKN, Korlantas polri, Provinsi Maluku Utara, dan NTB. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. **Kemensos:** memberikan *support* dalam melakukan verifikasi keluarga ataupun *ground check*, yang datanya akan dipergunakan sebagai data pembaharuan DTSEN;
- b. **Kemendesa dan PDT:** meminta dan menerima data yang dimiliki oleh kemendesa dan PDT yang dipergunakan untuk memperkaya variabel DTSEN;
- c. **BKN dan Korlantas Polri:** meminta data dari kedua Lembaga tersebut yang dipergunakan untuk memperkaya variabel DTSEN, tetapi sampai saat ini belum berhasil;
- d. **Provinsi Maluku Utara, dan NTB:** membantu pemerintah dalam melakukan pemutakhiran DTSEN, dan sampai saat ini masih berlangsung.

B. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut per prioritas

1. Dalam pelaksanaannya, **kegiatan penghitungan kemiskinan ekstrem** ini menghadapi beberapa kendala teknis:
 - a. Perubahan metodologi Bank Dunia dalam penghitungan kemiskinan ekstrem pada level internasional mengharuskan BPS mempelajari secara mendalam dan menyesuaikan perubahan tersebut ke dalam penghitungan kemiskinan ekstrem di level nasional;
 - b. Konsep penghitungan kemiskinan ekstrem Bank Dunia kini mengakomodasi perbedaan temporal dan spasial. Untuk perbedaan temporal (*temporal differences*), Bank Dunia menggunakan *Consumer Price Index* (CPI) agar garis kemiskinan yang digunakan tetap bersifat absolut dari waktu ke waktu. Sementara itu, untuk perbedaan spasial (*spatial differences*), Bank Dunia menerapkan *spatial deflator* yang dibentuk dari informasi pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga pada level kabupaten/kota. Dalam penerapannya, BPS menghadapi kendala karena Bank Dunia menggunakan perubahan *CPI March-to-March* (*year-on-year*), sedangkan pelaksanaan SUSENAS Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025 sebagai bentuk antisipasi perubahan pola konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan yang jatuh pada Maret 2025. Perbedaan waktu ini berimplikasi pada kebutuhan penyesuaian teknis dalam penggunaan CPI;
 - c. Mulai tahun 2025 Bank Dunia telah menggunakan garis kemiskinan ekstrem terbaru, yaitu US\$3,00 PPP 2021, menggantikan garis sebelumnya US\$2,15 PPP 2017. Pergeseran standar ini memerlukan adaptasi teknis tambahan dalam proses penghitungan;

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, berikut berbagai solusi yang telah dilakukan:

- a. BPS secara intensif berkonsultasi dengan Bank Dunia guna memperoleh kejelasan teknis terkait metodologi terbaru, sekaligus membahas penyesuaian yang diperlukan akibat pelaksanaan SUSENAS Maret 2025 yang dilakukan pada bulan Februari. Hasil konsultasi ini memperkaya kapasitas teknis tim BPS dalam penghitungan kemiskinan ekstrem dan menghasilkan kesepakatan terkait penyesuaian CPI serta komponen lain yang terdampak;
- b. BPS juga melakukan sosialisasi penghitungan kemiskinan ekstrem terbaru kepada

perwakilan BPS Provinsi pada kegiatan Rekonsiliasi Penghitungan Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025. Sosialisasi ini penting agar seluruh satuan kerja memahami metodologi baru, mampu menerapkannya secara konsisten.

Hasil dari rangkaian konsultasi dan sosialisasi tersebut meningkatkan kapasitas teknis tim BPS serta memastikan adanya kesepahaman nasional dalam menerapkan metodologi penghitungan kemiskinan ekstrem yang terbaru.

Sementara itu, sebagai tindak lanjutnya direncanakan beberapa hal berikut:

- a. Melakukan penyesuaian terhadap komponen penghitungan kemiskinan ekstrem, khususnya *spatial deflator* dan CPI, agar selaras dengan kondisi dan ketersediaan data Susenas 2026;
 - b. Melakukan penyesuaian khusus untuk penghitungan kemiskinan ekstrem periode September, mengingat *spatial deflator* pada level kabupaten/kota hanya dapat dihitung menggunakan data Susenas Maret 2025 sehingga diperlukan pendekatan teknis tambahan untuk menjaga konsistensi penghitungan pada periode tersebut.
2. **Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral** dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala di antaranya:
- a. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan terkait EPSS yang mengundang semua K/L sekaligus tidak dapat dilaksanakan secara luring karena tidak tersedia anggaran *full day*.

Solusi:

- a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian RI untuk menjadwalkan pembinaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan secara daring.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) : Perencanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026.

3.4 Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tercatat menorehkan prestasi yakni di antaranya mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPS pada bulan November 2025.



Gambar 3.4 Penerimaan Piagam Penghargaan Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat

Sementara itu, pada 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah berinovasi dengan menghasilkan beberapa terobosan berikut:



Gambar 3.5 Interface Web Infra Podes 2025

1. **Web Infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes.** Web ini dapat membantu meringankan beban petugas Podes dalam mengumpulkan data infrastruktur di desa dan mendapatkan data infrastruktur yang lebih lengkap (*tagging* lokasi infra). Inovasi ini mulai diterapkan pada tahun 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh internal unit kerja/satker dan BPS secara keseluruhan. Inovasi web infra ini telah digunakan oleh K/L/satker/unit kerja lain untuk mendukung pekerjaannya. Berikut adalah *link* dan penggambaran inovasi web infra Podes <https://infrastruktur.web.bps.go.id/>.

2. **Inovasi Penggunaan Big Data Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).** Inovasi ini bermanfaat untuk: (1) Menghemat sumber daya manusia; (2) Menghemat waktu; (3) Efisiensi anggaran. Bekerja sama dengan Bappenas dan menggunakan *intelligent media analytics* (IMA) yang fasilitasnya dimiliki Pusdatin Bappenas. Penggunaan big data dalam IDI ini mulai diterapkan pada 2025 untuk menghitung IDI 2024. Penerima manfaat inovasi IDI antara lain, internal unit kerja/satker seperti Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, DAPS (untuk data Indeks HAM), maupun BPS secara keseluruhan, dan KL lain di antaranya Kemendagri (IKU Kemendagri), Bappenas (RPJMN, RPJPN, RKP, SDG's), Kemendagri (IKU Kemendagri), Kementerian HAM (RPJMN), dan Pemda (IKU Gubernur, RPJMD), maupun Perguruan tinggi, lembaga kajian sosial politik, NGO. Inovasi ini telah direplikasi oleh K/L/satker/unit kerja lain seperti Kementerian HAM yang menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh IDI dalam mengumpulkan data Indeks HAM (rilis 15 Desember 2025). Berikut adalah tautan bukti dukung replikasi <https://www.antaraneews.com/berita/5305996/kementerian-ham-dan-bps-luncurkan-indeks-ham-indonesia>.

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2025, Pagu total anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum pada PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025 sebesar Rp7.012.174.000. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, tidak semua pagu total anggaran tersebut dapat digunakan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga termasuk BPS tidak terkecuali Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Dampak efisiensi tersebut yaitu besar anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV Tahun 2025 hanya sebesar Rp1.669.416.000 dengan realisasi sebesar Rp1.412.265.949 (84,60 persen). Realisasi anggaran menurut rincian output dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran 2025 Menurut Rincian Output

No	Rincian Output	Pagu yang dapat Digunakan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap Pagu yang dapat Digunakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2907.BDB.100 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	44.466.000	31.390.000	70,59
2	2907.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	1.543.958.000	1.312.544.440	85,01
3	2907.BMA.008 Publikasi/Laporan Pendataan Podes	80.992.000	68.331.509	84,37
Jumlah		1.669.416.000	1.412.265.949	84,60

Sumber: SAKTI per 30 Desember 2025

Bila dilihat dari rincian *output*, maka berdasarkan Tabel 3.7, persentase realisasi tertinggi pada rincian *output* Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial dan terendah pada *output* Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga. Terdapatnya anggaran yang realisasinya tidak mencapai 100 persen disebabkan adanya kebijakan yang membatasi revisi antar akun sehingga sisa anggaran narasumber dan belanja bahan yang ada tidak dapat direvisi dan berdampak pada tidak optimalnya penyerapan anggaran. Meskipun demikian Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dengan membandingkan Capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut dapat diperoleh nilai efisiensi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025, seperti yang disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Tabel Efisiensi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Menurut Sasaran dan Total


Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi**)
1.5 Terwujudnya penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas				100	1.624.950.000	1.380.875.949	84,98	1,18
Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persen	100	100	100	1.624.950.000	1.380.875.949	84,98	1,18
2.1.3 Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial				120	44.466.000	31.390.000	70,59	1,70
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektor Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Poin	64,39	85,72	120	44.466.000	31.390.000	70,59	1,70
Total				110	1.669.416.000	1.412.265.949	84,60	1,30

*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir

**) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%)/Persentase realisasi anggaran 2025 (%)

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat ditunjukkan bahwa nilai efisiensi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 mencapai lebih dari 1, baik untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat maupun totalnya. Ini berarti Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah efisien dalam penggunaan anggaran untuk mencapai kinerjanya. Adapun upaya-upaya efisiensi yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 yaitu:

1. Pelatihan Desa Cantik Kabupaten/Kota dilakukan secara *online* pada kegiatan Desa Cantik;

- 
2. Koordinasi dengan K/L terkait jadwal penyusunan publikasi maupun pelaksanaan pembinaan statistik sektoral dilakukan secara daring/*online meeting*;
 3. Sosialisasi ke daerah terkait kegiatan penyusunan publikasi maupun kegiatan lain secara *online*;
 4. Pemberian penghargaan Desa Cantik dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan BPS lain;
 5. Mengundang rapat dengan peserta KL tanpa memberikan anggaran transport lokal untuk peserta KL tersebut;
 6. Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif agar kegiatan yang dicakup lebih optimal;
 7. Rate paket *meeting* yang digunakan lebih rendah dari SBM agar kebutuhan jumlah peserta dapat terpenuhi.

The background is a complex digital-themed illustration. It features a light blue grid with a white line graph showing fluctuating data points. Overlaid on this are various geometric shapes: blue spheres of different sizes, some connected by thin white lines to form a network or molecular structure. There are also abstract, flowing blue lines that resemble data streams or network paths. The overall color palette is dominated by shades of blue, from light cyan to deep navy, with some white highlights.

BAB 4

PENUTUP

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan statistik di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Dari sisi capaian kinerja, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 secara rata-rata mencapai 110,00 persen, naik 2 persen dari pencapaian 2023 dan 2024 yang mencapai 108 persen. Pada sasaran kegiatan dengan IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas” diperoleh realisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja 100 persen. Sedangkan realisasi pada sasaran kegiatan dengan IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Ketahanan Sosial” sebesar 85,72 poin dengan capaian kinerja mencapai 120 persen. Sementara itu dengan nilai SAKIP Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 sebesar 74,60, untuk ukuran Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 diperoleh NKO rata-rata sebesar 94,5 atau predikat baik untuk seluruh sasaran.

Jika dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja unit kerja lain pada Eselon II yang sama pun, capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial lebih tinggi dibanding rata-rata capaian kinerja pada lingkup DBSS yang sebesar 108,41 persen. Adapun bila dibandingkan terhadap target Renstra 2025-2029 adalah capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas” mencapai 100 persen baik terhadap target 2025 maupun 2029. Sedangkan capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial Direktorat Statistik Ketahanan Sosial” mencapai 120 persen terhadap target tahun 2025 dan mencapai 112,2 persen terhadap target tahun 2029.

Beberapa Kegiatan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang termasuk Prioritas Nasional, Presiden, maupun Isu Strategis terdiri dari Penghitungan Kemiskinan Ekstrem dan Pembinaan Statistik Sektorial. Adapun *output* kegiatan tersebut di antaranya: adanya penurunan persentase penduduk miskin ekstrem dibanding tahun 2024. Sementara untuk kegiatan PSS, *output* tahun ini sama dengan tahun sebelumnya tetapi penilaiannya berbeda. Pada tahun ini penilaiannya adalah Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorial dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mendapatkan nilai sebesar 85,72 poin.

Pagu total anggaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum pada PK sebesar Rp7.012.174.000. Dengan adanya kebijakan efisiensi untuk semua K/L, anggaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang dapat digunakan sampai akhir triwulan IV Tahun 2025

hanya sebesar Rp1.669.416.000. Realisasi anggaran total sebesar Rp1.412.265.949 (84,60 persen). Pagu anggaran yang dapat digunakan untuk IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas” sebesar Rp1.624.950.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.380.875.949 (84,98 persen). Adapun untuk IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial” dengan pagu yang dapat digunakan sebesar Rp.44.466.000 dan realisasinya Rp31.390.000 (70,59 persen). Karena realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerjanya baik per sasaran maupun total sehingga diperoleh nilai efisiensi lebih dari satu maka dapat dinyatakan bahwa Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah efisien dalam penggunaan anggaran untuk mencapai kinerjanya dengan berbagai upaya efisiensi yang sudah dilaksanakan selama triwulan I-IV tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk rekomendasi perbaikan kinerja berupa rencana tindak lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 triwulan I-IV adalah sebagai berikut.

A. RTL untuk IKU “Persentase Publikasi/ Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas” adalah sebagai berikut:

1. **Podes:** (1) Pengiriman surat kegiatan Podes 2026 ke Daerah; rapat Interkementerian tentang Kebutuhan Data pada Podes 2026, penyusunan kuesioner, buku pedoman, dan bahan ajar dan QC Podes 2026; (2) Pelatihan Podes (*Workshop* Intama, Pelatihan Innas, Pelatihan Inda, Pelatihan Petugas) dan Pengumpulan Data; (3) Evaluasi Data dan Pengolahan Podes serta IKG.; dan (4) Finalisasi data Podes serta Penyusunan publikasi Podes.
2. **Descan:** (1) Persiapan Kegiatan Desa Cantik 2026 ; (2) *Monitoring* Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026; (3) Uji Coba CAWI dan *Dashboard* Penilaian Desa Cantik 2026, Sosialisasi Penilaian Desa Cantik 2026, Penilaian Mandiri Desa Cantik, Verifikasi Penilaian Desa Cantik di Provinsi, *Desk Evaluation*, *Field Evaluation*, Pleno Penilaian Akhir Desa Cantik; dan Penganugerahan Desa Cantik Terbaik 2026 ; (4) Pemeriksaan *Output* Desa Cantik 2026 dan Keberlanjutan 2021-2025 untuk Web Desa Cantik, Pembuatan Kepka Desa Cantik Revisi 2026, dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik).
3. **SLHI:** (1) Melakukan evaluasi penyusunan Publikasi SLHI 2026; (2) Rapat pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Menyiapkan surat permintaan data ke K/L, Menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (*dummy table*, dsb), Melakukan *zoom meeting* dengan K/L terkait untuk koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2026, dan Tersesainya perpanjangan PKS antara BPS dengan BMKG; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Melakukan entri data pada Publikasi SLHI 2026, dan pemeriksaan data pada Publikasi SLHI 2026.; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Rapat evaluasi data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2027, dan Melakukan rilis Publikasi SLHI 2026.

4. **SDLP:** (1) Melaksanakan evaluasi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, reviu kinerja tahap diseminasi dan evaluasi SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026; (2) Perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan pesisir serta Persiapan tema, *outline*, dan narasi publikasi, penguatan aplikasi SISLH 2026 kolaborasi dengan Tim Direktorat Sistem Informasi Statistik, pengumpulan data sekunder di tingkat daerah, menyusun draf narasi/analisis tematik, dan penyusunan *template* publikasi; (3) Lanjutan perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan pesisir serta penyusunan publikasi, pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, pencarian informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), melanjutkan draf narasi/analisis tematik/menyusun infografis, memfinalkan *template* publikasi, dan melaksanakan penyusunan publikasi; (4) dan Lanjutan pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, lanjutan periode pencarian informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggaran, lanjutan periode pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya, lanjutan pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), memfinalkan draf narasi/analisis tematik/infografis, melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam diseminasi kegiatan penyusunan publikasi Statistik Sumber Daya Laut Pesisir, evaluasi internal, dan finalisasi publikasi.
5. **ALHB:** (1) Rapat Pembahasan Persiapan kegiatan ALHB tahun 2026 (2) Rapat pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, menyiapkan surat permintaan data ke K/L, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (*dummy table*, dsb), dan melakukan *zoom meeting* dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi ALHB 2026; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, melakukan entri data pada Publikasi ALHB 2026, dan melakukan pemeriksaan data pada Publikasi ALHB 2026; dan (4) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, dan melakukan rilis Publikasi ALHB 2026.
6. **Statkrim:** (1) Rapat persiapan kegiatan Statistik Kriminal 2026, pengiriman surat kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan *web entry* Simonpolkam 2026; (2) Rapat pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, menyiapkan surat permintaan data ke K/L dan daerah, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (*dummy table*, *outline* publikasi, dsb), dan melakukan reviu dan perancangan *web entry* dalam rangka pengumpulan data kriminal 2026; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, melakukan pengolahan data Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan data Publikasi Statistik Kriminal

- 2026; dan (4) Menyusun draf Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Statistik Kriminal 2026.
7. **Statpol:** (1) Rapat persiapan kegiatan Statistik Politik 2026, pengiriman surat kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan *web entry* Simonpolkam 2026; (2) Koordinasi dengan sumber data untuk penyusunan Statistik Politik 2026 dilakukan lebih awal sebelum 30 Juni 2026; (3) Pengumpulan data dan dokumentasi dari sumber data sudah dilakukan sebagai dukungan pada penulisan publikasi Statistik Politik 2026; dan Mengajukan penggunaan akun Indesign lebih dari satu orang untuk mempercepat penyusunan publikasi Statistik Politik 2026.
 8. **SPAK:** (1) Persiapan kegiatan SPAK 2026; (2) Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan SPAK yang dapat dilaksanakan di antaranya penyusunan *Quality Gates* SPAK 2026 dan pengumpulan data literatur SPAK 2026; (3) Pengolahan dan pemeriksaan data SPAK; dan (4). penyusunan publikasi IPAK 2026. (catatan RTL 2-4 dapat dilaksanakan bila anggaran SPAK 2026 tersedia).
 9. **Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia:** (1) Menyusun perbandingan (*trend analysis*) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis.; (2) Penyusunan *outline* dan *dummy table* untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional; (3) Menerima data Susenas KOR dari Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penyusunan publikasi kemiskinan makro, melakukan reviu sintaks pengolahan untuk data KOR (karakteristik kemiskinan), melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pengolahan karakteristik kemiskinan, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan karakteristik kemiskinan dan menyusun draf halaman muka (*cover*) Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro; dan (4) Melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025, dan mengunggah naskah Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025 melalui Simotik.
 10. **Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota:** (1) Menyusun perbandingan (*trend analysis*) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis; (2) Penyusunan *outline* dan *dummy table* untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional; (3) Reviu kembali sintaks pengolahan (d disesuaikan dengan kuesioner *ter-update*),

pemeriksaan kondisi data (konsistensi, penimbang, dsb), pengolahan angka kemiskinan kabupaten/kota 2026, rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/kota 2026 dengan BPS Daerah, pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2025, pemeriksaan silang (*crosscheck*) hasil pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2026, dan penyusunan draf publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026; dan (4) Menyusun analisis karakteristik kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data Susenas Maret 2026, melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026, dan mengunggah naskah Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025 melalui Simotik.

11. **Rilis Kemiskinan Juli:** (1) Penyusunan *Timeline* BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk BPS daerah, dan melakukan revidi sintaks pengolahan; (2) Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draf Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025; (3) Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.
12. **Rilis Ketimpangan Juli:** (1) Penyusunan *Timeline* BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk BPS daerah, dan melakukan revidi sintaks pengolahan; (2) Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draf Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025; (3) Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.

B. RTL untuk IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral” adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral tahun 2026.
2. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral.
3. Melakukan monev mandiri semester 1.
4. Melakukan pembinaan ke KL yang menjadi lokus pembinaan.
5. Melakukan monev mandiri semester 2.
6. Menyusun laporan.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2025-2029, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menetapkan target sebagai pedoman dalam melakukan seluruh kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dapat dicapai selama tahun 2025 dalam PK yang dijabarkan pada tabel berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nurma Midayanti, SSI, M.Env.Sc
Jabatan : Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama

Dr. Nurma Midayanti, SSI, M.Env.Sc
NIP. 19660417198901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	64,39 Poin

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Rp.	7.012.174.000
	Jumlah	Rp.	7.012.174.000

Deputi Bidang Statistik Sosial



Dr. Ateng Hattano, SE, M.Si
NIP. 19690109199211 1 001

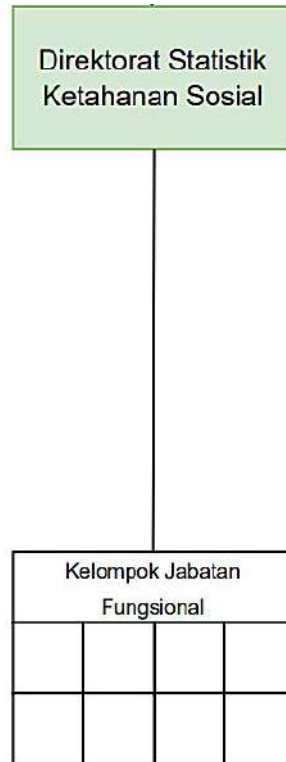
Palembang, 24 Januari 2025
Direktur Statistik Ketahanan Sosial



Dr. Nurma Midayanti, S.Si, M.Env.Sc
NIP. 19660417198901 2 001

Lampiran 2 Struktur Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2020
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik



Lampiran 3 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	S3	S2	S1	DIV	DIII	< DIII	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	2	35	3	27	-	-	67

Lampiran 4 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

Unit Organisasi	Golongan Kepangkatan								Jumlah
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	6	15	17	15	5	7	1	1	67

Lampiran 5 Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Unit Organisasi	Direktur	Jabatan Fungsional					Jumlah
		Statistisi Madya	Statistisi Muda	Statistisi Pertama	Arsiparis Ahli Pertama	Umum	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	1	12	28	24	1	1	67



Lampiran 6 Daftar Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas Tahun 2025

1. Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes);
2. Laporan Desa Cantik (Descan);
3. Publikasi Analisis Lingkungan Berkelanjutan (ALHB);
4. Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI);
5. Publikasi Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP);
6. Publikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
7. Publikasi Statistik Kriminal (Statkrim);
8. Publikasi Statistik Politik (Statpol);
9. Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia;
10. Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Rilis Kemiskinan Juli;
12. Riis Ketimpangan Juli.

Lampiran 7 Surat Hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710. Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857045, Homepage/ <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025 Jakarta 3 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB)
Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan
Realisasi Kinerja Triwulan III dan IV 2025

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh 12 unit kerja di lingkup BPS RI telah berkualitas. Hasil penilaian dapat dilihat pada Lampiran 2.
2. Berdasarkan hasil tersebut, maka seluruh publikasi yang dikoordinasikan dengan 12 unit kerja tersebut dinyatakan berkualitas, baik yang disusun oleh unit kerja, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.
3. Hasil penilaian ini menjadi rujukan dalam menghitung realisasi kinerja triwulan III dan IV 2025 pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan "Persentase Publikasi/Laporan Statistik yang Berkualitas".
4. Kepala BPS Provinsi agar menyampaikan informasi ini kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Utama,



Puji ismartini

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan; dan
3. Inspektur Utama.



*Dokumen ini telah dicatat/ditampar untuk keabsahan menggunakan aplikasi e-CHECK yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (0000)
*Prosedure (SOP) yang berlaku untuk menggunakan e-CHECK

-2-

Lampiran I Surat Plt. Sekretaris Utama

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025.

Daftar Pejabat Penerima Surat

1. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
2. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat
3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial
4. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
6. Direktur Statistik Industri
7. Direktur Statistik Distribusi
8. Direktur Statistik Harga
9. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
10. Direktur Neraca Produksi
11. Direktur Neraca Pengeluaran
12. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik
13. Seluruh Kepala BPS Provinsi



Elektronik ini tidak menggantikan surat resmi. Untuk informasi yang lebih lanjut, kunjungi www.bps.go.id.
Printed with 100% recycled paper and soy-based ink.

Lampiran II Surat PII Sekretaris Utama

Nomor : B-600/02000/PR.613/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

Hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025

No	Kode	Nama Unit Kerja	Domain Kualitas Data	Aspek Pemanfaatan Data Statistik	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4100	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	4.20	3.67	Berkualitas
2	4200	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	4.67	4.33	Berkualitas
3	4300	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	3.64	4.33	Berkualitas
4	5100	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4.48	3.67	Berkualitas
5	5200	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	4.07	4.00	Berkualitas
6	5300	Direktorat Statistik Industri	4.55	3.67	Berkualitas
7	6100	Direktorat Statistik Distribusi	3.70	4.00	Berkualitas
8	6200	Direktorat Statistik Harga	4.00	3.67	Berkualitas
9	6300	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	3.42	3.67	Berkualitas
10	7100	Direktorat Neraca Produksi	3.21	3.67	Berkualitas
11	7200	Direktorat Neraca Pengeluaran	4.17	4.00	Berkualitas
12	7300	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	3.50	3.67	Berkualitas



Halaman ini telah dipindai menggunakan aplikasi pemindai yang telah dilain oleh Data Indonesia. Untuk lebih detail, kunjungi <https://www.data.go.id>



Lampiran 8 Daftar K/L/D/I Target Pembinaan Statistik Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

1. Kejaksaan Agung RI;
2. Kepolisian Negara RI;
3. Kementerian Sosial;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Kementerian Desa dan PDT;
6. Kementerian Transmigrasi.



**Lampiran 10 Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 202
Tahun 2025**

- Apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat.



Lampiran 11 Daftar Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

1. Web infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes;
2. Inovasi Penggunaan Big Data Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Lampiran 12 Anggaran Belanja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi SAKTI per 30 Desember 2025

1. IKU 1: Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas menggunakan anggaran dari 2 output yaitu:

a. BMA 006. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Desember 2025

Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK
Unit Organisasi : 01 BADAN PUSAT STATISTIK
Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK

Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,624,950,000	0	1,319,573,118	61,302,831	1,380,875,949	84.98 %	244,074,051
GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1,624,950,000	0	1,319,573,118	61,302,831	1,380,875,949	84.98 %	244,074,051
GG.2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	1,624,950,000	0	1,319,573,118	61,302,831	1,380,875,949	84.98 %	244,074,051
BMA Data dan Informasi Publik	1,624,950,000	0	1,319,573,118	61,302,831	1,380,875,949	84.98 %	244,074,051
BMA.006 PUBLIKASI LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	1,543,950,000	0	1,251,927,609	60,616,831	1,312,544,440	85.01 %	231,413,560
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,740,000	0	2,550,000	0	2,550,000	68.18 %	1,190,000
051 PERSIAPAN	184,431,000	0	161,364,000	8,000,000	169,364,000	91.83 %	15,067,000
052 PENGUMPULAN DATA	122,543,000	0	86,220,189	26,405,107	110,625,296	90.27 %	11,917,704
053 PENGOLAHAN DAN ANALISIS	1,009,984,000	0	972,107,580	28,211,724	1,000,319,304	99.04 %	9,664,896
054 BISEMINASI DAN EVALUASI	223,260,000	0	29,685,840	0	29,685,840	13.30 %	193,574,160

b. BMA 008. Publikasi/Laporan Pendataan Podes

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Desember 2025

Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK
Unit Organisasi : 01 BADAN PUSAT STATISTIK
Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK

Hal 7 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BMA.008 PUBLIKASI LAPORAN PENDATAAN PODES	80,992,000	0	67,645,509	686,000	68,331,509	84.37 %	12,660,491
051 PERSIAPAN	11,300,000	0	0	0	0	0.00 %	11,300,000
052 PENGUMPULAN DATA	69,692,000	0	67,645,509	686,000	68,331,509	98.05 %	1,360,491

2. IKU 2: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Desember 2025

Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK
Unit Organisasi : 01 BADAN PUSAT STATISTIK
Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	44,466,000	0	21,080,000	10,310,000	31,390,000	70.59 %	13,076,000
GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	44,466,000	0	21,080,000	10,310,000	31,390,000	70.59 %	13,076,000
GG.2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	44,466,000	0	21,080,000	10,310,000	31,390,000	70.59 %	13,076,000
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	44,466,000	0	21,080,000	10,310,000	31,390,000	70.59 %	13,076,000
BDB.100 PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL KETAHANAN SOSIAL	44,466,000	0	21,080,000	10,310,000	31,390,000	70.59 %	13,076,000
100 PELAKSANAAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL	44,466,000	0	21,080,000	10,310,000	31,390,000	70.59 %	13,076,000

Lampiran 13 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2025																								
Unit Kerja :		Direktorat Statistik Ketahanan Sosial																						
Nilai SAKIP 2025:		74,6																						
Predikat SAKIP 2025:		BB/Sangat Baik																						
Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja	Jenis (KU atau Proksi)	Jenis (Triwulan atau Tahunan)	Jenis (% atau Non %)	Target	Satuan	Alokasi Target (Kumulatif)				Realisasi (Kumulatif)				Capaian Kinerja										
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	Terhadap Target Triwulan		Terhadap Target Setahun								
T1: Mewujudkan Pemusatan Kebijakan dan Peningkatan Keputusan Berbasis Data Statistik Realitas dan <i>Insight</i> yang Relevan																								
1.1.5	Terdapatnya penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas			100	Persen	0	0	0	100	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
1.1.5.1	1.1.5.1 Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas																							
	X : Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas			12		0	0	0	12	0	0	0	12											
	Y : Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang			12		12	12	12	12	12	12	12	12											
T2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien																								
2.1.3	Terdapatnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial			64,39	Poin	15,59	45,19	57,99	64,39	48,32	71,20	78,70	85,72	120,00	120,00	120,00	120,00	75,04	110,58	120,00	120,00			
	2.1.3.1 Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial																							
													Capaian Kinerja IKU		120,00	120,00	120,00	110,00	37,52	55,29	60,00	110,00		
													Capaian Kinerja Sasaran 1.1.5											100,00
													Capaian Kinerja Sasaran 2.1.3											120,00

Lampiran 14 Surat Hasil Penilaian SAKIP Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857048, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : T-306/08100/PW.120/LHE/2025 Jakarta, 22 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025

Yth. Direktur Statistik Ketahanan Sosial
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, Inspektorat Wilayah I telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menunjukkan nilai sebesar "74.60" dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah "Sangat Baik".

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara beserta seluruh jajaran, atas kerjasama dan kesungguhan dalam memenuhi dokumen pendukung kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Semoga Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dapat lebih meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerjanya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result-oriented government*) dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Plt Inspektur Wilayah I,

Eko Yuwono

Tembusan:

1. Deputi Bidang Statistik Sosial
2. Inspektur Utama



* Dokumen ini telah diintegrasikan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Badan Seriisasi Elektronik (BSE), DSDN
* Untuk more QR di samping untuk menampilkan file asli

Lampiran LHE Akuntabilitas Kinerja
Surat Nomor: T-306/08100/PW.120/LHE/2025
Tanggal 22 Desember 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja BPS untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; (e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



* Dokumen ini telah diunggah/tersedia elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan dan Jatah Sertifikasi Elektronik (SSEK), ESSV
* Please note QR is linking to our information file only

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS;
8. Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS Tahun 2025;
9. Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Surat Tugas Inspektur Wilayah I Nomor: B-46/08100/PW.110/2025, tanggal 18 Juli 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sesuai lampiran Evaluator dan Unit Kerjanya.

B. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Nilai hasil akhir evaluasi atas implementasi SAKIP berupa penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja dengan kategori predikat sebagai berikut:



* Dokumen ini telah disahkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), 00201
* Please scan QR to verify the digital signature

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 - 70)	Baik
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai)
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang

C. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif dengan menyesuaikan pada tujuan evaluasi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan kendala yang ada. Dilakukan pemeriksaan dokumen dan analisis bukti-bukti yang telah dikirimkan sesuai jangka waktu permintaan dokumen evaluasi yang ditetapkan, serta perbandingan dengan berbagai informasi kinerja pada beberapa sistem manajemen kinerja BPS.

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta pegawai dalam pembahasan capaian kinerja dan penggunaan data kinerja dalam pembahasan aktivitas serta perubahan budaya organisasi melalui penggunaan Kipapp yang mengelola aktivitas kinerja untuk seluruh pegawai.
2. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan penyajian informasi yang lengkap terkait analisis dan perbandingan data capaian kinerja yang konsisten dengan dokumen sumber sesuai dengan standar penyusunan Laporan Kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memperbaiki proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah maupun tahunan sehingga kebutuhan kinerja diketahui oleh pimpinan dan semua pihak yang berkepentingan.



* Dokumen ini telah diabadikan menjadi eBook menggunakan aplikasi ePubcreator yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), ESSY.
 * Please visit QR to support your smartphone file.

E. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan metode evaluasi sederhana/*desk evaluation*, dan evaluasi terbatas menggunakan data awal pengisian kertas kerja implementasi SAKIP dan kriteria dokumen evaluasi yang diisi oleh anggota tim Evaluator, dan reviu berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. Selanjutnya dilakukan reviu antar tim evaluator melalui kegiatan panelisasi Evaluasi AKIP. Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memperoleh nilai "74.60" dengan predikat "BB" yaitu "Sangat Baik", dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.80	22.80
2.	Pengukuran Kinerja	30	22.80	22.80
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.50	10.50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50	18.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74.60	74.60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Perencanaan Kinerja

- 1) Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015.
- 2) Unit kerja telah menyusun Renstra Terbaru 2025-2029, ditandatangani Pimpinan, dan dipublikasikan pada laman PPID.
- 3) Unit Kerja telah menetapkan PK Pimpinan Unit Kerja Tahun 2025 serta mempublikasikan pada laman PPID.
- 4) Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.
- 5) Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja melalui aplikasi KRISNA.



* Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), BSSN
* Untuk more QR, di samping untuk verifikasi M- and

- 6) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka menengah unit kerja periode sebelumnya yang ditandatangani dan dipublikasikan melalui PPID dengan lengkap, yaitu Reviu Renstra 2020 dan Renstra 2025-2029
- 7) Telah terdapat seluruh dokumen perencanaan kinerja jangka pendek lima tahun terakhir yang ditandatangani dan dipublikasikan pada laman PPID Unit Kerja dengan lengkap, yaitu Perjanjian Kinerja 2025, Perjanjian Kinerja 2024, Perjanjian Kinerja 2023, Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja 2021.

b. Kondisi kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah dipublikasikan tepat waktu pada aplikasi SIMONEV (paling lambat tanggal 24 Juni untuk unit kerja pusat dan 23 April untuk unit kerja daerah).
- 2) Renstra 2025-2029 telah memuat rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang mengacu pada Perka BPS terkait IKU Tahun 2025-2029
- 3) Renstra 2025-2029 telah memuat target kinerja yang akan dicapai untuk periode 2025-2029
- 4) PK Pimpinan Unit Kerja telah mengacu pada Surat PLT Sestama B-172/02000/PR.130/2025 untuk unit kerja daerah dan No B-66/02000/PR.630/2025 untuk unit kerja pusat
- 5) Rapat pembahasan Renstra 2025-2029 telah dilengkapi undangan yang telah ditandatangani Pimpinan.
- 6) Penetapan target pada PK telah dilengkapi dengan penjelasan dasar hitung yang memadai untuk tiap indikator Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 7) Penetapan target pada PK telah dilengkapi dengan penjabaran basis data yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 8) Penetapan target pada PK telah dilengkapi penjelasan argumen logis yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.



* Dokumen ini telah dibubuhkan/arsipkan secara elektronik menggunakan sistem arsip digital yang diterbitkan oleh Jasa Sertifikasi Elektronik (JSE), LSPV

* Anda dapat QR di samping untuk memampukan file ini

- 9) Penetapan target PK telah memerhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya/kondisi kinerja terakhir untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (terdapat baseline 2024 khusus pada PK 2025).
 - 10) Penetapan target PK telah ditetapkan secara menantang dengan memerhatikan batas minimal berdasarkan kebijakan nasional untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
 - 11) Daftar hadir rapat pembahasan Rencana Strategis 2025-2029 telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
 - 12) Rapat pembahasan Renstra 2025-2029 telah dilengkapi notulen yang telah ditandatangani Pimpinan.
 - 13) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 telah dilengkapi dengan penjelasan dasar hitung yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
 - 14) Rapat penetapan target pada PK terbaru telah dilengkapi undangan yang ditandatangani Pimpinan.
 - 15) Daftar hadir rapat penetapan target pada PK terbaru telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
 - 16) Rapat penetapan target pada PK telah dilengkapi notulen yang ditandatangani Pimpinan.
 - 17) Unit Kerja telah memiliki dokumen penjenjangan kinerja disetiap level jabatan
 - 18) Penetapan SKP tahun 2025 pada aplikasi KipApp telah mencakup seluruh pegawai.
- c. Kondisi pemanfaatan Perencanaan Kinerja
- 1) Unit Kerja telah memiliki dokumen anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
 - 2) Unit Kerja telah memiliki dasar hitung revisi anggaran.
 - 3) Dokumen revisi anggaran telah ditandatangani oleh PPK dan KPA (KAK/ tabel revisi POK)



* Dokumen ini telah diklasifikasi secara otomatis menggunakan sistem kecerdasan yang diterbitkan oleh Balai Sentra-asia (BSIC), BSSN
* Anda bisa QR di samping untuk mendapatkan file asli

- 4) Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit Kerja telah mendukung kinerja yang ingin dicapai sebagaimana terlihat dalam dokumen Renstra.
- 5) Unit Kerja telah melakukan monitoring capaian Renstra 2024.
- 6) Rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah dilengkapi undangan yang ditandatangani Pimpinan.
- 7) Daftar hadir rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah menunjukkan keterlibatan pimpinan.
- 8) Rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah dilengkapi notulen yang ditandatangani Pimpinan.
- 9) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kedepan dalam rangka mencapai target jangka menengah untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 10) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis telah memuat pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 11) Reviu target Rencana Strategis telah dilakukan paling sedikit satu tahun sekali dan telah dilakukan identifikasi ketercapaian target akhir Renstra 2020-2024
- 12) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah ditandatangani Pimpinan
- 13) Daftar hadir rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 14) Rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah dilengkapi oleh notulen yang ditandatangani Pimpinan.
- 15) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra 2020-2024 telah membahas seluruh Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.
- 16) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah menyajikan target, reviu target dan realisasi 2020-2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.



* Dokumen ini telah dipadatkan secara elektronik menggunakan simbol elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (PSN), BSSN
* Kode mesin QR di samping untuk mempermudah file ini

- 17) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah menyajikan status ketercapaian terhadap target akhir renstra 2024
- 18) Notulen rapat pembahasan ketercapaian target akhir renstra telah memuat penjelasan yang memadai terkait analisis faktor pendukung dan penghambat ketercapaian target di setiap indikator
- 19) Target akhir Renstra 2024 untuk Seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan telah tercapai

Kelemahan Komponen Perencanaan Kinerja:

a. Kelemahan Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Kualitas rumusan hasil berdasarkan Perka IKU BPS 2025-2029 belum disusun berdasarkan Critical Succes Factor (CSF) yang memadai untuk mencapai kondisi kinerja yang ingin dicapai
- 2) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi ukuran kinerja yang SMART.
- 3) Rumusan IKU 2025-2029 belum sepenuhnya menunjukkan hubungan sebab-akibat antar level kinerja yang memadai dalam menggambarkan kondisi kinerja yang harus dicapai
- 4) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 belum dilengkapi dengan penjabaran basis data yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu pada indikator 2.1.4.1. Dalam indikator tersebut belum disebutkan secara rinci desa-desa yang menjadi target program Desa Cantik Tahun 2026-2029. Apabila jumlah desa terlalu banyak, dapat dilampirkan tautan yang memuat daftar lengkap desa yang menjadi target program tersebut.
- 5) Penetapan target pada Renstra 2025-2029 belum dilengkapi penjelasan argumen logis yang memadai untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu pada indikator 2.1.4.1 belum terdapat argumen logis atau penjelasan yang mendasari penetapan target Desa Cantik pada Tahun 2025 sebesar 0%.



*Dokumen ini akan dibudidigitasi secara elektronik menggunakan sistem elektronis yang diintegrasikan oleh Sistem Informasi Geospasial (SIG), DSDY
*Media kode QR di samping untuk mempermudah akses

- 6) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat menunjukkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

b. Kelemahan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- 1) Notulen rapat monitoring capaian Rencana Strategis tidak menyajikan target jangka menengah tahun 2024 dengan realisasi 2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Realisasi untuk iks 2.1.1 dan 2.1.2 tertulis sebesar 100 berbeda dengan realisasi di lakin maupun fra tw 4 2024 yaitu sebesar 133.33 sehingga capaian untuk dua iks tersebut menjadi tidak sesuai
- 2) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra tidak memuat capaian tahun 2024 terhadap target jangka tahun 2024 untuk tiap Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Realisasi untuk iks 2.1.1 dan 2.1.2 tertulis sebesar 100 berbeda dengan realisasi di lakin maupun fra tw 4 2024 yaitu sebesar 133.33 sehingga capaian untuk dua iks tersebut menjadi tidak sesuai
- 3) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat analisis kendala serta upaya yang telah dilakukan hingga periode 2024 pada setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Namun demikian, Masih terdapat redaksi dari kendala dan solusi berupa "Tidak terdapat kendala" yaitu pada iks 1.1.3
- 4) Notulen rapat pembahasan monitoring capaian Renstra telah memuat batas waktu rencana tindak lanjut/rencana aksi pada setiap Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Namun demikian, terdapat satu indikator yang tidak mencantumkan batas waktu, yaitu indikator 1.1.3. Selain itu, terdapat indikator yang hanya mencantumkan tahunnya saja tanpa menyebutkan periode triwulan (minimal triwulanan), yaitu indikator 2.1.1 dan 2.1.2.



* Dokumen ini akan disediakan secara elektronik menggunakan simbol elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (PSN), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk mendapatkan file asli

2. Pengukuran Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Pengukuran Kinerja

- 1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS Pasal 23 dan 24.
- 2) Terdapat dasar hitung hingga X dan Y pada realisasi dari seluruh Indikator Kinerja pada notulen tw I 2025
- 3) Terdapat Analisis dan Penjelasan terkait basis data hingga X dan Y dari realisasi di seluruh indikator kinerja pada notulen tw I 2025
- 4) Telah terdapat Surat Keputusan/SK Tim SAKIP Unit Kerja.
- 5) Telah terdapat ketentuan yang jelas jika terjadi kesalahan data pada proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja.
- 6) Telah terdapat kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 7) Telah terdapat kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid pada mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 8) SK Tim SAKIP telah memuat nama dan kedudukan dalam Tim.
- 9) SK Tim SAKIP telah mengakomodir perwakilan dari Tim Kerja Penanggungjawab IKU.
- 10) SK Tim SAKIP telah memuat uraian tugas untuk tiap kedudukan dalam Tim.
- 11) SK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring target, realisasi dan capaian jangka menengah
- 12) SK Tim SAKIP telah memuat tugas untuk melakukan monitoring target, realisasi dan capaian triwulanan
- 13) Telah terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja yang up to date.
- 14) Telah terdapat penanggung jawab yang jelas pada mekanisme pengumpulan data kinerja.



* Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Please note: CK is simply an information file only

- 15) Telah terdapat waktu delivery yang jelas pada mekanisme pengumpulan data kinerja.

b. Kondisi kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) Unit Kerja telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja.
- 2) Undangan rapat evaluasi capaian kinerja telah ditandatangani Pimpinan.
- 3) Daftar hadir rapat evaluasi capaian kinerja telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 4) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah ditandatangani Pimpinan.
- 5) Informasi target, realisasi, dan capaian pada seluruh indikator kinerja telah selaras antara Notulen rapat kinerja triwulan I Tahun 2025, FRA triwulan I Tahun 2025 dengan dokumen sumber/pendukung FRA triwulan I Tahun 2025
- 6) Seluruh IKS telah konsisten antara target pada PK 2025 dan FRA 2025.
- 7) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan batas waktu tindak lanjut tiap Indikator Kinerja Sasaran, dengan batas akhir dari rentang waktu pelaksanaan rencana aksi/Rencana Tindak Lanjut pada triwulan berikutnya; atau ketika target tahunan sudah terealisasi 100% pada triwulan 1, batas waktu tindak lanjut dilakukan sampai tahun berikutnya.
- 8) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat informasi target dan realisasi setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 9) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan analisis masalah/kendala setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 10) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan solusi/strategi yang telah dilakukan setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 11) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan rencana aksi/rencana tindak lanjut setiap Indikator Kinerja Sasaran.
- 12) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat penetapan PIC yang akan melaksanakan rencana aksi/rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran.



*Dokumen ini telah dibenarkan sebagai dokumen resmi melalui sistem informasi yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Dokumen (SID), 02021
*Pinda kode QR di samping untuk memastikan file asli

- 13) Unit Kerja telah mengirimkan FRA setiap triwulannya dengan tepat waktu.
- 14) SKP bulanan yang berstatus dinilai telah divalidasi oleh pejabat penilai kinerja.
- 15) Pengelolaan data kinerja telah memanfaatkan aplikasi monev.bps.go.id dan webapps.bps.go.id/kipapp, namun masih belum memadai karena belum terintegrasi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja, sehingga pemantauan atas keselarasan antara perencanaan, capaian kinerja unit kerja, dan capaian kinerja individu belum dapat dilakukan.

c. Kondisi pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) SKP bulanan telah dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian Tunjangan Kinerja meskipun belum terintegrasi secara sistem.
- 2) Rapat evaluasi capaian kinerja TW I 2025 telah dihadiri oleh sebagian besar/seluruh pegawai (minimal 80 persen dari total pegawai)
- 3) Unit kerja telah menyampaikan mekanisme reward and punishment kepada seluruh pegawai di unit kerja.
- 4) Reward and punishment Triwulan I tahun 2025 sudah menilai seluruh pegawai di unit kerja
- 5) Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. Persentase penyederhanaan struktur Organisasi BPS telah mencapai 100% pada tahun 2023 dan telah dalam posisi ideal meskipun ke depannya masih perlu pertimbangan terkait eselon III dan IV yang masih ada khususnya di Unit Kerja Pusat. Implementasi di Unit Kerja Pusat dan BPS Provinsi berupa pelaksanaan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 29 November 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPS.
- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi kebutuhan pegawai. Unit Kerja telah memenuhi formasi jabatan sesuai hasil analisis beban kerja (Kepka BPS Nomor 182 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja Tahun 2024 di Lingkungan BPS).



* Dokumen ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), LSPN.
** Please note: QR at samping untuk memverifikasi keaslian

- 7) Notulen rapat pembahasan Renstra telah memuat strategi dalam Renstra BPS.
- 8) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat arah kebijakan dalam Renstra BPS.
- 9) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat aktivitas dalam Renstra BPS.
- 10) Notulen rapat penyusunan Renstra telah memuat pembahasan anggaran dalam Renstra.
- 11) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja telah memuat pembahasan upaya efisiensi.
- 12) Unit kerja telah memiliki mekanisme reward and punishment level tim kerja/pegawai yang telah dilegalisasi untuk Triwulan I tahun 2025
- 13) Kriteria reward and punishment Triwulan I tahun 2025 dalam kertas kerja telah menggunakan minimal 1 kriteria terkait kinerja.

Kelemahan Komponen Pengukuran Kinerja:

a. Kelemahan Kualitas Pengukuran Kinerja

- 1) Dokumentasi atas pelaksanaan Rencana aksi/RTL belum sesuai untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Pada IKSS 2.1.3.1, terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang bukti dukungnya belum tepat, antara lain:
 - a). Kegiatan Penjadwalan pembinaan Pembahasan Proses Bisnis Statistik dan Kualitas Data Statistik sampai Juni 2025 pada Kementerian Transmigrasi;
 - b). Penjadwalan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pembahasan Prinsip Satu Data Indonesia dan Asistensi Metadata Statistik pada bulan Mei 2025 untuk Kementerian Transmigrasi;
 - c). Permintaan akun Kementerian Transmigrasi untuk Indah dan Romantik pada bulan April; dan kegiatan lainnya.
 - d). Masih ada yang bukti nya dilakuakn di luar rentang TW I 2025
- 2) Penilaian SKP bulanan tahun 2025 pada aplikasi KipApp belum mencakup seluruh pegawai, yaitu sebesar 99,77%.



* Dokumen ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), LSSN.
 * Untuk lebih lanjut, kunjungi laman www.kemendagri.go.id

- 3) Hasil pengukuran SKP bulanan belum seluruhnya dapat diverifikasi atau ditelusuri hingga ke sumbernya. Sebagai contoh, pada SKP atas nama Trophy Endah Rahayu, SST., M.Si., keterangan pada kolom Realisasi Berdasarkan Bukti Dukung hanya memuat jumlah kegiatan maupun dokumen tanpa merinci jenis kegiatan, aktivitas, atau dokumen yang dimaksud
- 4) Unit Kerja belum memiliki media pengelolaan data kinerja selain yang berasal dari ketentuan BPS Pusat.

c. Kelemahan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) Reward and punishment Triwulan I tahun 2025 belum didukung kertas kerja yang telah dilegalisasi
- 2) Bukti pemberian reward belum konsisten dengan kertas kerja, karena pada kertas kerja pegawai yang memperoleh reward tidak tercantum nama lengkapnya sehingga tidak dapat diverifikasi, serta tidak disertai dengan peringkat.

3. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi pemenuhan Pelaporan Kinerja

- 1) Unit kerja telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024).
- 2) Undangan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah ditandatangani Pimpinan.
- 3) Daftar hadir rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah menunjukkan keterlibatan Pimpinan.
- 4) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah ditandatangani Pimpinan.
- 5) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat informasi target dan realisasi.
- 6) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat pembahasan rencana aksi/rencana tindak lanjut tiap IKS.



* Dokumen ini telah dibastarografi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), B2G1
* Please scan QR if having trouble downloading file and

- 7) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulanan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) telah memuat kesepakatan pihak yang melakukan tindak lanjut tiap IKS.
- 8) Laporan Kinerja telah disusun dan diformalkan (ditandatangani pimpinan Unit Kerja).
- 9) Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada PPID.
- 10) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu (tidak melebihi tanggal 21 Februari 2025)
- 11) Laporan Kinerja 5 periode terakhir (2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024) telah disusun, diformalkan, dan dipublikasikan tepat waktu.

b. Kondisi kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Sistematika Laporan Kinerja telah memuat: Ringkasan Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup.
- 2) Laporan Kinerja telah dilengkapi tabel target kinerja jangka menengah sesuai Reviu Renstra 2020-2024.
- 3) Laporan Kinerja telah memuat seluruh pencapaian Sasaran Strategis dan IKS sesuai dengan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022.
- 4) Informasi target pada Laporan Kinerja telah konsisten dengan PK tahun 2024.
- 5) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan data kinerja yang memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024.
- 6) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan data kinerja yang memadai antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024 yang konsisten dengan FRA Triwulan IV tahun 2024.
- 7) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023.
- 8) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2022.
- 9) Laporan Kinerja telah memuat tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun 2021.



* Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), BSSN.
* Untuk kode QR di samping untuk memastikan file asli

- 10) Perbandingan pada Laporan Kinerja telah dilengkapi dengan analisis.
- 11) Laporan Kinerja telah memuat informasi perbandingan capaian kinerja total periode 2020-2024.
- 12) Laporan Kinerja telah memuat perbandingan capaian kinerja 2024 di Unit Kerja dengan capaian kinerja 2024 di level nasional (dalam/antar eselon III)
- 13) Laporan Kinerja telah memuat analisis terkait perbandingan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja kedepannya
- 14) Seluruh capaian kinerja pada Laporan Kinerja telah didasarkan atas data yang valid dan dapat diandalkan.
- 15) Laporan Kinerja telah memuat analisis atas ketercapaian kinerja setiap IKS.
- 16) Laporan Kinerja telah memuat evaluasi atas capaian kinerja setiap IKS disertai masalah/kendala dan solusi/upaya dalam upaya mencapai target kinerja.
- 17) Laporan Kinerja telah memuat informasi efisiensi anggaran.
- 18) Laporan Kinerja telah memuat upaya-upaya efisiensi yang telah dilakukan.
- 19) Laporan Kinerja telah memuat nilai/kuantifikasi efisiensi yang telah dicapai hasil dari upaya yang telah dilakukan.

c. Kondisi pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 telah dihadiri seluruh/sebagian besar pegawai.
- 2) Telah terdapat pembagian kinerja berdasarkan matriks peran hasil Pimpinan dan Ketua Tim (JFT) tahun 2024.
- 3) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV 2024 telah menjabarkan informasi penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
- 4) Laporan Kinerja telah memuat informasi realisasi anggaran keuangan tiap sasaran strategis.



* Dokumen ini telah dibenarkan/pada secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSnE), BSSN
* Nomor kode QR di samping untuk menverifikasi file asli

- 5) Unit Kerja telah memiliki mekanisme reward and punishment yang telah dilegalkan pada level tim/pegawai untuk tahun 2024
- 6) Kriteria dalam kertas kerja telah menggunakan minimal 1 (satu) kriteria kinerja untuk tahun 2024.
- 7) Bukti reward and punishment untuk tahun 2024 telah konsisten dengan kertas kerja.

Kelemahan Komponen Pelaporan Kinerja:

a. Kelemahan Pemenuhan Pelaporan Kinerja

- 1) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan (Triwulan II, III, dan IV Tahun 2024) telah memuat pembahasan masalah/kendala serta solusi/upaya yang telah dilakukan pada setiap Indikator Kinerja Sasaran (IKS). Namun demikian, masih terdapat uraian kendala yang redaksinya justru menimbulkan pemahaman seolah-olah tidak terdapat kendala, yaitu pada IKSS 2.1.1 dan 2.1.2 di semua triwulan tersebut.
- 2) Notulen rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan (Triwulan II, III, dan IV tahun 2024) memuat kesepakatan batas waktu tindak lanjut tiap IKS, namun ada yang beberapa indikato yang batas waktu Tindak lanjut tidak sesuai kriteria yaitu:
 1. Pada TW 2 2024 ikss 2.1.1. dan 2.1.2 batas watunya 2025 sedangkan pada kriteria minimal menyebutkan triwulannya
 2. Pada TW 3 2024 ikss 1.1.2 batas watunya 2025 sedangkan pada kriteria minimal menyebutkan triwulannya

b. Kelemahan Kualitas Pelaporan Kinerja

- 1) Lakin sudah memuat target PK 2024 namun masih ada iks yang belum selaras dengan PK terakhir 2024 yaitu pada iks Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (%)
- 2) Laporan Kinerja telah memuat tabel realisasi tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024 yang selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra namun belum menambahkan tabel perbandingan atau capaian nya
- 3) Laporan Kinerja (LAKIN) telah memuat evaluasi dan analisis per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan melalui tabel perbandingan antara realisasi dan



Dokumen ini telah dibastarungol secara otomatis menggunakan perangkat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSnE), BSSN.
* Penda kode QR di samping untuk memverifikasi file asli

capaian akhir Renstra. Namun demikian, penyajian tersebut belum sepenuhnya selaras dengan notulen monitoring capaian Renstra. Sebagai contoh, dalam notulen disebutkan bahwa kegiatan dan proses penyelesaiannya telah dilaksanakan pada Triwulan III, sedangkan dalam LAKIN masih dicantumkan adanya kendala koordinasi pada level eselon I dan II terkait rilis/penyampaian hasil yang sulit disesuaikan waktunya karena kesibukan masing-masing pejabat tinggi.

- 4) Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja setiap IKS pada Laporan Kinerja belum sesuai dengan notulen pembahasan FRA Triwulanan tahun 2024, yaitu
 - a). IKSS 1.1.2 Dalam notulen tertulis tidak terdapat kendala. Namun, dalam Laporan Kinerja disebutkan kendala, yaitu: Tim Kemiskinan dihadapkan pada opsi penggunaan tiga jenis penimbang, yaitu penimbang berdasarkan proyeksi SUPAS 2015, penimbang LF berdasarkan 34 provinsi, dan penimbang LF berdasarkan 38 provinsi. Rilis indikator kemiskinan dan ketimpangan Maret 2024 yang semula dijadwalkan 15 Juli 2024 dimajukan menjadi 1 Juli 2024.
 - b). IKSS 1.1.3 Dalam notulen tertulis tidak terdapat kendala. Namun, dalam Laporan Kinerja disebutkan kendala, yaitu: Tim IDI, rilis/penyampaian hasil IDI tidak dapat dilakukan di BPS, Tim Statistik Kriminal, data Susenas yang menjadi dasar penghitungan indikator statistik kriminal belum tersedia.
 - c). IKSS 2.1.2 Dalam notulen tertulis tidak terdapat kendala. Namun, dalam Laporan Kinerja disebutkan kendala, yaitu: Anggaran pembinaan tatap muka hanya tersedia untuk dua kali full day meeting dengan menghadirkan enam K/L dan peserta terbatas dua orang per K/L, sehingga pembinaan ke setiap K/L menjadi kurang fokus dan kurang intensif.
 - d). IKSS 2.1.1 Dalam notulen tertulis tidak terdapat kendala. Namun, dalam Laporan Kinerja disebutkan kendala, yaitu: Standar pengumpulan data di BNPT (IRT dan IKAP) masih mengikuti standar masing-masing produsen data.



* Dokumen ini telah diposting sebagai akses elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSIC), BSSN
* Untuk kode QR di samping untuk menampilkannya ke web

- 5) Bab III Laporan Kinerja belum memuat informasi rencana perbaikan ke depan pada setiap indikator yang selaras dengan notulen FRA triwulan IV 2024 atau monitoring capaian Renstra 2024
- 6) Bab IV Laporan Kinerja belum menjelaskan Informasi rencana perbaikan secara umum hasil kesimpulan dari pembahasan rencana aksi atau tindaklanjut yang telah dijelaskan pada Bab III.

c. Kelemahan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat evaluasi capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 belum didukung dengan bukti yang memadai, yaitu
 1. Pada IKSS 1.1.1 tertulis bahwa akan dilakukan evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan publikasi pada delapan publikasi, namun yang dilampirkan bukan berupa rapat evaluasi melainkan tabel pengolahan draft sementara publikasi dan sebagainya.
 2. Pada IKSS 1.1.2 tidak terdapat bukti rencana tindak lanjut yang dilampirkan.
 3. Pada IKSS 1.1.3 tertulis bahwa akan dilakukan evaluasi dalam rangka penyiapan perhitungan atas empat indikator, namun yang dilampirkan adalah tabel pengolahan.
 4. Pada IKSS 2.1.1 dan IKSS 2.1.2 tidak terdapat bukti rencana tindak lanjut yang dilampirkan.
- 2) Reward and punishment tahun 2024 belum didukung kertas kerja yang telah dilegalisasi
- 3) Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan persentase pegawai pada Unit Kerja telah menyusun SKP Penilaian 2024 pada Aplikasi KipApp sebesar 99,78%.



* Dokumen ini telah dicantumkan secara otomatis menggunakan simbol elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS2i), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menyaksikan file asli

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berupa Peraturan Kepala BPS Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan BPS, Keputusan Kepala BPS Nomor 354 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator AKIP di Lingkungan BPS 2025, dan Surat Edaran Inspektur Utama BPS Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP BPS 2025
- 2) Telah terdapat Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP, berupa SOP Evaluasi AKIP untuk Unit Kerja BPS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Evaluasi AKIP dilakukan terhadap seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah yang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.
- 4) Evaluasi AKIP telah dilakukan oleh Tim Evaluator dalam bentuk gugus tugas.
- 5) LHE AKIP pada Unit Kerja telah dilegalisasi oleh Inspektur.
- 6) LHE AKIP yang dilegalisasi Inspektur telah disampaikan kepada Unit Kerja.
- 7) Evaluasi AKIP Unit Kerja dilakukan dengan memanfaatkan instrumen yang dibangun oleh Koordinator Evaluasi Pusat.
- 8) Pemberitahuan Evaluasi AKIP Tahun 2025 pada seluruh Unit Kerja Pusat dan Daerah telah dilakukan melalui Surat Inspektur Utama B-13/08000/PW.110/2025 tanggal 26 Mei 2025
- 9) Unit Kerja telah memenuhi dokumen evaluasi AKIP dengan lengkap dan tepat waktu
- 10) Unit Kerja telah melakukan tindak lanjut atas semua rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- 11) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 3 periode terakhir (2022, 2023, 2024) dilaksanakan secara konsisten (terjadi peningkatan nilai SAKIP selama 3 tahun terakhir)

b. Kondisi kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar waktu.



* Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), KESB
* Please note: QR is displayed to refer to the digital version.

- 2) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai standar anggaran.
- 3) Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi AKIP.
- 4) Evaluasi AKIP telah dilakukan dengan mekanisme rewiu berjenjang dari Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta rewiu tingkat 2 dalam bentuk panel antar Tim.
- 5) Pimpinan Unit Kerja atau perwakilan telah mengikuti kegiatan entry meeting pelaksanaan evaluasi AKIP 2025
- 6) Pimpinan Unit Kerja atau perwakilan telah mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan evaluasi AKIP 2025
- 7) Pengisian Kertas Kerja Implementasi SAKIP dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Tim SAKIP Unit Kerja/Operator Unit Kerja.
- 8) Evaluasi AKIP telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu dengan: instrumen evaluasi yang komprehensif, LHE telah memuat penjelasan kelemahan pada tiap kriteria beserta rekomendasi yang spesifik pada aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan; telah terdapat kerangka logis pelaksanaan evaluasi AKIP; ketersediaan anggaran untuk pendalaman evaluasi; dan telah dilakukan panelisasi hasil evaluasi antar Unit Kerja yang dievaluasi.
- 9) Tim Evaluasi AKIP telah melakukan monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi evaluasi AKIP Unit Kerja tahun 2024 dan melaksanakan Evaluasi tahun 2025.
- 10) Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 telah disahkan oleh pimpinan APIP secara tepat waktu.
- 11) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi, yaitu aplikasi SINERGI dan berbasis web yang dapat diakses melalui sinergi.web.bps.go.id.

c. Kondisi pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Unit kerja telah dapat mencapai target kinerja pada triwulan I 2025 dengan total capaian kinerja sebesar minimal 100%



* Dokumen ini telah dibastarasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), KSSN
* Please note: QR is available for verification on the site

- 2) Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan terdapat peningkatan hasil evaluasi dibanding tahun sebelumnya.
- 3) Hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 4) Unit Kerja telah memperoleh predikat WBK/WBBM dari (Tim Penilai Internal BPS/Tim Penilai Eksternal) dengan Kategori C (telah melakukan Pencanangan ZI)

Kelemahan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

a. Kelemahan Pemanfaatan Evaluasi Kinerja

- 1) Tindak lanjut rekomendasi LHE 2024 yang telah sesuai sebesar 50%
- 2) Unit kerja tidak mendapatkan penghargaan yang terkait dengan kinerja pada periode Juli 2024 s.d. Juni 2025.

F. Rekomendasi

Terhadap hasil evaluasi tersebut serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Direktur Statistik Ketahanan Sosial untuk:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan strategis dengan menyempurnakan notulen penetapan target Renstra melalui penambahan dasar hitung yang sistematis, basis data pendukung yang valid, dan alasan logis yang komprehensif untuk setiap target [1.2.4.1]
2. Meningkatkan kualitas monitoring kinerja strategis dengan menyempurnakan notula monitoring capaian Renstra 2025 melalui penambahan analisis capaian yang akurat, kendala yang mendalam, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas [1.3.2.1]
3. Memperbaiki sistem dokumentasi tindak lanjut dengan mengembangkan database bukti pelaksanaan RTL yang komprehensif berupa dokumentasi foto kegiatan, laporan progress, dan bukti output kegiatan yang terstruktur



* Dokumen ini telah diarsipkan/diunggah secara elektronik menggunakan antarmuka elektronik yang disediakan oleh Saksi Elektronik (SEK), 0203/2022
* Pindai kode QR di samping untuk menjangkau file asli

sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjut dapat diverifikasi. [2.2.12.1]

4. Menyempurnakan mekanisme pengukuran kinerja individu dengan mengembangkan sistem verifikasi SKP Maret 2026 yang memungkinkan penelusuran hingga ke sumber data yang valid melalui dokumentasi bukti dukung yang sistematis [2.2.13.1]
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2026 yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment dengan menyusun mekanisme yang komprehensif, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, melibatkan seluruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi pimpinan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja [2.3.14.1]
6. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2026 yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment yang selaras dengan kertas kerja penilaian [2.3.14.2]
7. Memperbaiki kualitas dokumentasi evaluasi kinerja dengan merevisi notula TW II, III, dan IV 2025 agar memuat analisis capaian yang akurat, kendala yang komprehensif, solusi yang terstruktur, rencana tindak lanjut yang spesifik, penetapan PIC yang jelas, dan batas waktu yang tegas sesuai pedoman. [3.1.17.1]
8. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyempurnakan Lakin 2025 agar memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Biro Perencanaan melalui gap analysis, revisi sistematis, dan implementasi template standar sehingga laporan kinerja dapat menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif dan informatif [3.2.21.1]
9. Memperbaiki sistem dokumentasi tindak lanjut dengan mengembangkan database bukti pelaksanaan RTL TW IV 2025 yang komprehensif berupa dokumentasi foto, laporan progress, dan bukti output kegiatan yang terstruktur sehingga dapat memastikan pelaksanaan tindak lanjut dapat diverifikasi. [3.3.19.1]
10. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja 2025 sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian reward dan punishment dengan menyusun mekanisme yang



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan prosedur elektronik yang diatur oleh akan Sistemasi Elektronik (SSE), ISGP
* Please note: QR is a way to verify the document's file.

komprensif, menetapkan kriteria kinerja yang jelas, melibatkan seluruh pegawai dalam penilaian, dan memastikan legalisasi pimpinan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja [3.3.20.1]

Selanjutnya bukti tindak lanjut atas rekomendasi agar didokumentasikan dan akan dipantau pada evaluasi akuntabilitas kinerja periode Tahun 2026.

Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja:

1. Eko Yuwono, SAB, M.M. (Pengendali Teknis)
197106041994031003
2. Herry Purdiyanto, SST, M.Ak (Ketua Tim)
197607131999031002
3. Ezra Priska Donny Anggoro, SST, M.M. (Anggota Tim)
199306222016021001



* Dokumen ini telah diotentikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), BSSN
* Untuk lebih detail silakan kunjungi laman www.bssn.go.id



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL